

**EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN PERIKANAN TERHADAP  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR  
(STUDI KASUS KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE  
SULAWESI SELATAN)**

---

---

**SKRIPSI**

---

---

Oleh:

**TIAS EKA WATY**



**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
JURUSAN PERIKANAN  
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2011**

**EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN PERIKANAN TERHADAP  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR  
(STUDI KASUS KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE  
SULAWESI SELATAN)**

**Oleh:**

**TIAS EKA WATY**

Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
pada  
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan



**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
JURUSAN PERIKANAN  
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan)

**Nama** : TIAS EKA WATY

**Stambuk** : L 241 06 023

**Program Studi** : Sosial Ekonomi Perikanan

**Skripsi telah diperiksa  
dan disetujui oleh :**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Prof. Dr. Ir. Hj. Sutinah Made, M.Si**  
**NIP. 1961 0323 198601 2002**

**Dr. Andi Adri Arief, S.Pi, M.Si**  
**NIP. 1971 0422 200501 1001**

**Mengetahui :**

**Dekan  
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan  
Universitas Hasanuddin**

**Ketua Program Studi  
Sosial Ekonomi Perikanan**

**Prof. Dr. Ir. A. Niartiningsih, MP**  
**NIP. 1961 1201 198703 2002**

**Ir. Amiluddin, M.Si**  
**NIP. 1968 1220 200312 1001**

**Tanggal Lulus:** November 2011

## ABSTRAK

TIAS EKA WATY, Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan). Dibimbing oleh Hj. Sutinah Made dan Andi Adri Arief

---

Penelitian dilakukan untuk mengetahui masalah mengenai penyaluran dana PNPM M-KP apakah sudah sesuai dengan prosedur atau mekanisme, mengenai pelaksanaan PNPM M-KP apakah sudah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, mengenai tingkat pengembalian dana PNPM M-KP, dan mengenai manfaat adanya PNPM M-KP di Kecamatan Awangpone. Jenis penelitian yang digunakan adalah survey dengan metode pengambilan sampel secara kelompok (*Cluster Random Sampling*) yaitu dengan mengelompokkan responden dalam empat jenis usaha yaitu usaha penangkapan ikan, pembudidaya tambak, pembudidaya rumput laut dan pemasaran hasil perikanan dengan responden sebanyak 36 orang. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur atau mekanisme penyaluran dana berjalan sesuai dengan pedoman umum PNPM M-KP, tahap pelaksanaan program menunjukkan efektifitas dan efisisen penggunaan anggaran program, pengembalian dana bantuan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan adanya manfaat yang signifikan bagi masyarakat pesisir yang khusus mendapatkan dana bantuan BLM yaitu meningkatnya pendapatan kelompok, berkembangnya skala usaha kelompok dan peningkatan produksi.

Kata kunci: Evaluasi, Program, Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir

## ABSTRACT

TIAS EKA WATY, Evaluate The Program of Self-Supporting Society Enableness National Fishery Oceaninc To Enableness of Coastal Area Society ( Case Study of Subdistrict of Awangpone of Regency of Bone of South arch Sulawesi).

Guided by Hj. Sutinah Made and Andi Adri Arief

---

Research done to know the problem concerning channeling of fund of PNPM M-KP what have as according to procedure or mechanism, concerning execution of PNPM M-KP what have zero in on, timely and precisely sum up, concerning rate of return of fund of PNPM M-KP, and hit the benefit of existence of PNPM M-KP Subdistrict Awangpone. Research Type used survey with the method of intake sampel in group ( Cluster Random Sampling) that is by grouping responder in four type effort that is the effort fish arrest, pembudidaya dam out the, pembudidaya grass the sea and marketing result of fishery with the responder as much 36 people. Data collected with the observation method, interview and documentation. Result of research indicate that the procedure or mechanism of fund channeling walk as according to public guidance PNPM M-KP, execution phase program to show the efektifitas and efisisen of budget use program the, return relief fund disagree with expected, and existence of benefit which signifikan for special coastal area society get the relief fund BLM that is the increasing of group earnings, expanding of it scale effort group and product increase

Keyword: Evaluate, Program, Enableness, Coastal area Society

## RIWAYAT HIDUP



**TIAS EKA WATY.** Dilahirkan pada 19 Januari 1988 di Pattiro Bajo Kabupaten bone Propinsi Sulawesi Selatan. Anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Bakri dan Haslinda. Penulis mulai mengenyam pendidikan formal di SD Inpres 6/75 watampone (1994-2000), kemudian SLTP Negeri 2 Watampone (2000-2003), dan SMA Negeri 1 Watampone (2003-2006). Melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada tahun 2006, penulis diterima sebagai salah seorang mahasiswa di Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Jurusan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di berbagai kegiatan baik ekstra maupun intra kampus seperti :

### **Pelatihan & pertemuan ilmiah**

- Pengkaderan Dasar AROWANA #6 BEM Perikanan UH
- Coastal Marine Expedition #6 (CME #6) BEM Perikanan UH
- Diklat Profesi'06 mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan (HIMASEI) BEM KEMAPI UH Tahun 2007
- UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Universitas Hasanuddin (2007-2010)

## KATA PENGANTAR



***Assalamu Alaikum Wr .Wb.***

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, pemilik segala kesempurnaan, memiliki segala ilmu dan kekuatan yang tak terbatas, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan karunia selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian (skripsi) dengan judul **“Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penulisan laporan ini, penulis banyak mendapat dukungan, motivasi, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut menyumbangkan pikiran, tenaga dan inspirasi bagi penulis. Dan segala ikhlas dan tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta **Bakri** dan ibunda tersayang **Haslinda** yang selalu penulis kasihi dan banggakan. Terimakasih atas doa, kasih sayang dan pengorbanan kalian, semoga penulis mampu membahagiakan kalian. Serta seluruh saudaraku yang tersayang terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua di dunia dan di akhirat kelak, Amin.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Prof. Dr. Ir. Sutinah Made, M.Si** selaku pembimbing utama dan Bapak **Dr. Andi Adri Arief, S.Pi, M.Si** selaku pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan dukungan dan masukan yang sangat berharga dari awal penelitian hingga selesainya penulisan laporan ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Hj. Niartiningsih, MP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.

2. **Bapak Prof. Dr. Ir Najamuddin, M.Sc** selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Dr. Ir. Musbir, M.Sc** selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Ir Amiluddin, M.Si** selaku Ketua Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
5. **Bapak Dr. Andi Adri Arief, S.Pi, M.Si** selaku Penasehat Akademik yang telah bersedia membimbing dan memotivasi agar bisa memperoleh prestasi yang lebih baik.
6. Dosen-dosen penguji (**Ibu Prof. Dr. Ir. Sutinah Made, M.Si, Bapak Dr. Andi Adri Arief, S.Pi, M.Si, Ibu Sri Suro Adhawaty, SE, M.Si, Dr. Ir. Mardiana E Fachry, M.Si dan Bapak Ir Djumran Yusuf, MP**), terimakasih atas segala kritikan dan saran yang sangat membantu penulis dalam perbaikan skripsi ini.
7. Staf Pegawai akademik Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, terima kasih atas semua bantuannya.
8. Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, khususnya Bapak Sutamin, SP, Kanda Andi Amrawaty, S.Pi, dan kanda anto yang selalu sabar dan ikhlas meluangkan waktunya menjawab setiap pertanyaan dari penulis.
9. Seluruh kelompok masyarakat penerima bantuan PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone, terimakasih atas kerjasamanya.
10. Teman-teman HIMASEI khususnya SOSEK '06 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semangat untuk meraih gelar sarjana.
11. Teman-teman sosek 07 dan 08' terima kasih telah memberi support dan perhatiannya.
12. Buat Fikar Zulkifli, terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini.

Penulis telah berusaha menyajikan laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun disadari keterbatasan pengetahuan yang ada pada penulis membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun agar kedepannya dapat lebih baik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang berarti.

Makassar, Oktober 2011

*Penulis*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT .....	v
RIWAYAT HIDUP .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Evaluasi.....	6
B. PNPM Mandiri Kelautan Perikanan.....	8
C. Kondisi Masyarakat di Wilayah Pesisir.....	12
D. Kerangka Pikir.....	17
 III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	19
B. Jenis Penelitian.....	19
C. Teknik pengumpulan data.....	19
D. Jenis dan Sumber Data.....	20
E. Populasi dan Pengumpulan Sampel.....	20
F. Teknik dan Analisis Data.....	22
G. Konsep Operasional.....	23
 IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografi dan Administrasi Daerah .....	25
B. Kegiatan Ekonomi.....	25
C. Keadaan Penduduk .....	26

D. Sarana dan Prasarana.....	29
E. Karakteristik Responden.....	30
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum PNPM M-KP Sebagai Program Pemberdayaan Nasional .....	35
B. Prosedur Atau Mekanisme Penyaluran Dana PNPM M-KP.....	50
C. Pelaksanaan PNPM Mandiri-KP .....	56
D. Mekanisme Pengembalian Dana PNPM Mandiri-KP.....	62
E. Manfaat PNPM Mandiri-KP.....	65
F. Evaluasi PNPM Mandiri-KP.....	71
VI. PENUTUP	
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

No.	Teks	Hal
1	Daerah Sasaran PNPM M-KP di Kabupaten Bone Kecamatan Awangpone.....	3
2	Jumlah Populasi dan Sampel.....	21
3	Indikator Penilaian Variabel untuk Mengukur Tingkat Keberhasilan PNPM M-KP di Kecamatan Awangpone.....	22
4	Komposisi Penyebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	27
5	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Golongan Usia.....	28
6	Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana di Kecamatan Awangpone...	29
7	Karakteristik Responden Pemanfaatan Dana PNPM M-KP Berdasarkan Tingkat Umur.....	30
8	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	32
9	Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga	33
10	Identifikasi Kelompok.....	50
11	Kelompok Penerima Dana BLM.....	51
12	BLM pada PNPM M-KP Kecamatan Awangpone.....	53
13	Efektifitas Penyaluran Dana PNPM M-KP.....	55
14	Efektifitas Sasaran Penyaluran Dana PNPM M-KP.....	57
15	Efektifitas Waktu Penyaluran Dana PNPM M-KP.....	58
16	Rekapitulasi Usulan Dana PNPM M-KP Tahun 2009.....	60
17	Efektifitas Jumlah Penyaluran Dana PNPM M-KP.....	61
18	Rekapitulasi Usulan Dana PNPM M-KP Tahun 2010.....	61
19	Efektifitas Pengembalian Dana PNPM M-KP.....	63

20	Alokasi BLM.....	68
21	Manfaat Adanya PNPM M-KP .....	71
22	Evaluasi Implementasi Prosedur Penyaluran Dana PNPM M-KP.....	72
23	Evaluasi Pelaksanaan PNPM M-KP.....	73
24	Evaluasi Pengembalian Dana BLM PNPM M-KP.....	74

## DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Hal
1	Kerangka Pikir.....	18
2	Jumlah Pendudk Berdasarkan Golonngan Usia.....	28
3	Karakteristik Responden Pemanfaatn Dana PNPM M-KP Berdasarkan Umur.....	31
4	Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	32
5	Diagram Persentase Jumlah Tanggungan Responden.....	34
6	Mekanisme Penyaluran Dana PNPM M-KP.....	52
7.	Mekanisme Pengembalian Dana Bergulir.....	65
8.	Grafik Manfaat Adanya PNPM M-KP.....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks
1	Identitas Responden
2	Variabel Evaluasi Keberhasilan PNPM M-KP di Kecamatan Awangpone
3	Tanggapan Responden terhadap Evaluasi Keberhasilan PNPM M-KP
4	Daftar Kelompok Penerima Dana BLM PNPM M-KP 2009
5	Daftar Kelompok Penerima Dana BLM PNPM M-KP 2010
6	Alokasi Pemanfaatan BLM pada PNPM M-KP
7	Peningkatan Pendapatan Responden Per Tahun
8	Tanggapan Responden terhadap Peningkatan Pendapatan
9	Peta Lokasi Penelitian
10	Dokumentasi Penelitian

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.500 yang dikelilingi oleh laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup>. Pulau-pulau tersebut dihuni oleh penduduk dengan mata pencaharian terbesar sebagai tani dan nelayan. Mereka hidup dengan memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir. Akan tetapi menurut Dahuri dan Alimuddin (2004) bahwa masih kurang kesadaran masyarakat dalam melihat dan menyikapi makna penting dan strategisnya laut dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya dimana kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya laut merupakan segmen anak bangsa yang umumnya masih tergolong miskin. Kesejahteraan masyarakat pesisir memerlukan program terobosan baru yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap modal, manajemen dan teknologi serta dapat mentransformasikan struktur dan kultur masyarakat pesisir dan nelayan secara berkelanjutan.

Kemiskinan seolah-olah telah melekat akrab dalam kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, tingkat pendapatannya hanya sekitar Rp 300.000/bulan/kepala keluarga (Kusumastanto.T,2003). Citra kemiskinan nelayan sesungguhnya suatu ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Di dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi tinggi yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

Menurut Made et.al (2004), dalam memenuhi kebutuhan, para nelayan masih dominan berhubungan dengan lembaga non formal seperti ponggawa dan

pelepas uang, walaupun bunga pinjaman sangat tinggi yakni 30%. Menghadapi problematika masyarakat pesisir seperti itu, maka Dahuri (2001) menyatakan diperlukan berbagai program pemberdayaan sosial ekonomi. Sehingga diharapkan program pemberdayaan sosial yang dikembangkan tersebut akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu model yang dikembangkan pemerintah khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP). Program ini merupakan awal proses integrasi program pemberdayaan di lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-Mandiri KP) adalah program nasional yang dicanangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tahun 2009 dengan program dana bergulir yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, merupakan perwujudan komitmen nasional dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang akan dialokasikan ke 120 Kabupaten/kota di Indonesia. Di Sulawesi Selatan sendiri salah satunya adalah terdapat di Kabupaten Bone.

Kabupaten Bone merupakan daerah yang mempunyai potensi perikanan yang cukup besar, utamanya terdapat pada Kecamatan Awangpone yang meliputi 3 desa yaitu: Desa Kajuara, Desa Cari Gading dan Desa Mallari. Dimana ketiga desa tersebut sebagian besar berbatasan dengan laut yang memungkinkan masyarakat sepanjang pesisir pantai dapat memanfaatkan sumberdaya laut sebagai sumber penghidupannya. Namun pada kenyataannya, potensi yang melimpah tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Fakta empirik memperlihatkan bahwa keterbatasan modal



dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir membuat mereka belum mampu mengembangkan usahanya sehingga pendapatan yang mereka peroleh pun cenderung masih sangat rendah dan sebagian besar dari mereka masih tergolong masyarakat miskin dengan pola usaha yang masih bersifat tradisional

Upaya untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Bone, maka ada beberapa program pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang telah diintrodusir kepada masyarakat, salah satu diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di sektor Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP). Sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin kelautan dan perikanan yang tergabung dalam kelompok usaha yaitu usaha penangkapan ikan, usaha pengolahan hasil perikanan, usaha budidaya rumput laut dan usaha budidaya tambak. Daerah Sasaran PNPM Mandiri KP di Kabupaten Bone yaitu terdapat di Kecamatan Awangpone yang tersebar di tiga desa yakni desa Kajuara sebanyak 87 orang, Desa Carigading 49 orang dan Desa Mallari sebanyak 105 orang.

**Tabel 1.** Daerah Sasaran PNPM Mandiri-KP di Kabupaten Bone Kecamatan Awangpone

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Penerima
1	Awangpone	Kajuara	87 Orang
		Carigading	49 Orang
		Mallari	105 Orang
	<b>Jumlah</b>		<b>241</b>

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, 2009*

Adanya program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karenanya pelaksanaan program tersebut harus sepenuhnya dievaluasi sebagai salah satu upaya untuk perbaikan dan pengembangan dalam pengelolaannya, sehingga tujuan dari program tersebut dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat pesisir. Oleh

karena itu dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang: **“Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penyaluran dana PNPM Mandiri Kelautan Perikanan sudah sesuai dengan prosedur atau mekanisme di masyarakat pesisir?
2. Apakah pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan Perikanan sudah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah?
3. Sejauh mana tingkat pengembalian dana PNPM Mandiri-KP ?
4. Bagaimana manfaat adanya PNPM Mandiri Kelautan Perikanan bagi masyarakat sasaran di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penyaluran dana PNPM Mandiri Kelautan Perikanan sudah sesuai dengan prosedur atau mekanisme di masyarakat pesisir
2. Untuk mengetahui pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan Perikanan sudah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah
3. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengembalian dana PNPM Mandiri-Kelautan Perikanan

4. Untuk mengetahui manfaat adanya PNPM Mandiri Kelautan Perikanan bagi masyarakat sasaran di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan untuk menambah wawasan pola pikir dan pengembangan keilmuan sosial khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Menjadi bahan acuan bagi para peneliti lain yang mengadakan penelitian pada bidang yang sama.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Evaluasi

Evaluasi dalam bahasa Inggris adalah *Evaluation* yang berarti proses penilaian. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Evaluasi adalah sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat-saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk menilai/menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Proses evaluasi terbagi menjadi di awal (*pretest*) dan diakhir (*posttest*). *Pretest* merupakan sebuah evaluasi yang diadakan untuk menguji konsep dan eksekusi yang direncanakan. Sedangkan, *posttest* merupakan evaluasi yang diadakan untuk melihat tercapainya tujuan dan dijadikan sebagai masukan untuk analisa situasi berikutnya. Untuk mencapai evaluasi tersebut dengan baik, diperlukan sejumlah tahapan yang harus dilalui yakni menentukan permasalahan secara jelas, mengembangkan pendekatan permasalahan, memformulasikan desain penelitian, melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, menganalisis data yang diperoleh, dan kemampuan menyampaikan hasil penelitian (<http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi>, 2011).

Tingkat evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Pra Evaluasi, ada hubungan dengan pengarahan suatu proyek. Misalnya, perlu ada manajemen yang baik agar proyek/program dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana.
2. Evaluasi Antara, adalah evaluasi pada pertengahan implementasi, yaitu evaluasi ketika program atau proyek sedang mengatasi masalah. Hasil ini dapat dipakai untuk memodifikasi perencanaan atau strategi program/proyek. Misal, merubah sifat input, memodifikasi model intervensi dan menggeser penekanan atau kelompok target.
3. Evaluasi Akhir, adalah evaluasi ketika pembiayaan proyek tersebut berakhir. Evaluasi ini memberikan persepsi manfaat program dan dampak terhadap kegiatan. Rekomendasi ini adalah untuk memperbaiki perencanaan selanjutnya dan memiliki hubungan dengan kebijakan.

Kriteria Evaluasi yaitu (<http://webcache.googleusercontent.com>, 2011):

1. Efektifita : yang mengidentifikasi apakah pencapaian tujuan yang diinginkan telah optimal.
2. Efisiensi : menyangkut apakah manfaat yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai dari program publik sebagai fasilitas yang dapat memadai secara efektif.
3. Responsivitas: yang menyangkut mengkaji apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan/keinginan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu terhadap pemanfaatan suatu sumber daya.

## **B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) merupakan program nasional yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Secara umum PNPM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin. Sejalan dengan tujuan PNPM Mandiri, mulai tahun 2009, Departemen kelautan dan Perikanan melakukan integrasi program pemberdayaan masyarakat Mandiri Kelautan dan perikanan (PNPM Mandiri-KP) yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Program PNPM Mandiri-KP adalah bagian dari program nasional penanggulangan kemiskinan dalam lingkup PNPM Mandiri kategori PNPM-Penguatan, yang merupakan program pemberdayaan berbasis sektoral, kewilayahan dan khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu berdasarkan prioritas sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan-kegiatan yang dirancang dalam PNPM Mandiri-KP yang di arahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat yang dimulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan (Sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri-KP, 2009).

Pelaksanaan PNPM Mandiri-Kelautan dan Perikanan merupakan perwujudan komitmen nasional dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini berupaya untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan melalui integrasi beberapa program pemberdayaan yang telah dilaksanakan di lingkup DKP. Beberapa kegiatan tersebut antara lain seperti Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil, Pengembangan Usaha Kecil Perikanan

Budidaya (PUKPB), Pengembangan Kemitraan Melalui Kluster Industri Perikanan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), dan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM). Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-Kelautan dan Perikanan tidak serta merta menghilangkan program yang sudah berjalan dengan baik dan memang sudah direncanakan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan adanya PNPM Mandiri-KP dapat mewujudkan visi dan misi Mantri Kelautan dan Perikanan yaitu menjadikan Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015 dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (<http://www.kp3k.dkp.go.id>, 2011).

Tujuan PNPM Mandiri KP secara umum adalah Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat, Memberdayakan kelembagaan masyarakat untuk pengembangan kegiatan usahanya, Meningkatkan kemampuan usaha kelompok masyarakat, Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, Meningkatkan infrastruktur lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Meningkatkan kemitraan kelembagaan masyarakat dengan sumber permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tahap pemberdayaan yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri KP adalah Tahap Inisiasi yaitu kelompok masyarakat dibina, dilatih berbagai ketrampilan dan diberikan pendampingan, Tahap Penguatan yaitu kelompok masyarakat terbina dilatih untuk mampu memiliki peningkatan kapasitas kelembagaan, diberlakukannya sistem nilai atau aturan main organisasi dan peningkatan status badan hukum kelembagaan, Tahap Peningkatan Kemandirian yaitu kelompok masyarakat yang diperkuat ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya sehingga mampu mengakses kredit perbankan; difasilitasi dengan pendampingan serta penguatan kemitraan ekonomi dan sosial.

PNPM Mandiri KP merupakan bagian dari proses pemberdayaan nasional yang bermuara untuk menjadikan masyarakat sejahtera dan mandiri, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan-bantuan pemerintah yang diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal kelembagaan masyarakat yang terbentuk melalui beberapa program sebelumnya, antara lain Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan, Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3), kelompok pengolah dan pemasar, kelompok pengolahan hasil perikanan serta Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP). Keberhasilan program akan sangat bergantung dukungan dan kontribusi pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, peraturan dan perencanaan serta pendanaan (Numberi, 2009).

Program ini, dananya bersumber pada APBN yang dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP), yaitu langsung dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota. Sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi bertugas untuk melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dibantu oleh konsultan pelaksana dan tenaga pendamping yang bertugas sehari-hari mendampingi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Tenaga pendamping yang merupakan ujung tombak kegiatan ini bertugas untuk membuat perencanaan kegiatan pendampingan masyarakat, mempersiapkan masyarakat untuk memperoleh berbagai paket bantuan, membantu masyarakat dalam menyusun proposal kegiatan usaha, mendampingi masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, baik dalam proses produksi maupun pemasaran, mendampingi masyarakat dalam proses pencairan dana BLM, membuat laporan perkembangan pelaksanaan program setiap bulan, dan mendampingi konsultan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan



langsung dengan masyarakat sehingga juga berfungsi sebagai fasilitator dan motivator (<http://www.kp3k.dkp.go.id>, 2011).

Pelaksanaan PNPM Mandiri KP didasarkan pada siklus yang sistematis agar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan terencana dapat terlaksana sesuai dengan prinsip pemberdayaan, yaitu *helping the poor to help themselves*. Oleh karena itu program ini ditujukan untuk mengurangi jumlah pengangguran (*pro job*), meningkatkan kesempatan berusaha (*pro growth*), dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui peningkatan pendapatan (*pro poor*). Pelaksanaannya melalui berapa tahapan, yaitu: (1) Sosialisasi, (2) Perencanaan Pembangunan Wilayah, (3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat, (4) Peningkatan Akses Kredit Mikro, (5) Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah. Adapun tahapan proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri KP dilakukan melalui komponen program sebagai berikut: (1) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), (2) Penguatan Kelembagaan, dan (3) Pengembangan Usaha Mikro melalui Kemitraan.

Keberhasilan program yang telah digulirkan dan akan digulirkan diperlukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap program tersebut. Pada saat sekarang ini bahwa evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pengentasan kemiskinan pada kelompok-kelompok selalu diukur dengan non kuantitatif yaitu baik, sedang, kurang dan sebagainya. Mungkin pengukuran keberhasilan PNPM Mandiri-KP ataupun program-program pengentasan kemiskinan yang lainnya, sudah saatnya kita menggunakan metode pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dengan menggunakan pengukuran kuantitatif yaitu pengukuran yang dapat menunjukkan berapa persen pendapatan penduduk meningkat, dan berapa persen jumlah nelayan/petani ikan miskin yang telah menjadi tidak miskin lagi per kabupaten dan per provinsi (<http://dkp.sulteng.go.id>, 2011).

Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan berupaya untuk mengurangi kemiskinan, dengan memberikan bantuan bagi pengembangan usaha perikanan dan kelautan skala kecil. Hal ini diwujudkan dalam beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan sejak Departemen Kelautan dan Perikanan berdiri, antara lain:

- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir,
- Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Skala Kecil melalui Dana Penguatan Modal,
- Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap melalui Optimalisasi Usaha,
- Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melalui Klusterisasi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.

### **C. Kondisi Masyarakat di Wilayah Pesisir**

#### **1. Kemiskinan masyarakat pesisir**

Semakin panjang pantai, semakin banyak penduduk miskin Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir dan pantai Indonesia merupakan tempat atau kantung-kantung kemiskinan masyarakat nelayan. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan bukanlah suatu yang independent, melainkan akibat kebijakan masa lalu yang terlalu terkonsentrasi pada pembangunan wilayah darat (*continental orientation*) dan melupakan pembangunan wilayah laut (*maritime orientation*) sehingga menjadikan kelautan dan perikanan sebagai sektor pinggiran (*peripheral*). (Solihin. A, 2005).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak

dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan bisa bermakna subyektif, tetapi sekaligus juga bermakna obyektif. Secara obyektif bisa saja masyarakat tidak dapat dikatakan miskin, karena pendapatannya sudah berada di atas garis kemiskinan, yang oleh sementara ahli diukur menurut standar kebutuhan pokok berdasarkan kebutuhan beras dan gizi (Imran. M, 2003).

## **2. Kelembagaan Masyarakat Pesisir**

Kelembagaan berasal dari akar kata lembaga. Purwadaminta (2004) memberi arti lembaga sebagai badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Juga disebutkan bahwa lembaga dapat pula diartikan sebagai perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi social berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

Kelembagaan nelayan terdapat beberapa jenis antara lain kelembagaan ekonomi perbankan, koperasi, pasar, kelembagaan social seperti lembaga social masyarakat, punggawa-sawi, organisasi kemasyarakatan nelayan, dan lembaga pemerintah dalam hal ini departemen kelautan dan perikanan. Lembaga-lembaga tersebutlah yang selama ini mengatur dan banyak menentukan pengelolaan sumberdaya alam laut yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat nelayan (Dahuri, 2002).

Kelembagaan tradisional masyarakat pesisir, dinamika manusia dan sumberdaya tidak dapat dihindari. Dinamika itu sendiri berarti terjadi pergeseran kepentingan, jumlah pengguna, dan daya resistensi kelembagaan terhadap sistem sosial, politik, ekonomi, termasuk kebijakan pembangunan sektor perikanan dan lautan. Dinamika kelembagaan tradisional berfokus pengelolaan sumberdaya berkisar pada perdebatan pentingnya tujuan sosial dan tujuan ekonomi, asupan teknologi, daya adaptasinya terhadap kebijakan pemerintah

atau faktor eksternal lainnya, dan besaran kepatuhan, loyalitas yang masih dimiliki oleh masyarakat pesisir dalam menjalankan tatanan kelembagaan mereka. Sedangkan dinamika kelembagaan tradisional bertumpuh pada orientasi ekonomi berhadapan dengan asupan teknologi, institusi ekonomi mikro, misalnya koperasi dan lembaga perbankan lainnya (Yusran, M. 2005)

Menurut Sallatang.A (2000), kelembagaan masyarakat terdiri atas: kelembagaan masyarakat desa yang dapat diartikan sebagai norma lama atau aturan-aturan sosial yang merupakan bagian dari lembaga sosial yang saling berintraksi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa, kehidupan manusia yang satu berintegrasi secara melembaga dengan manusia lainnya. Itulah sebabnya lembaga masyarakat sebagai pranata sosial amat penting karena di dalamnya terdapat sekumpulan peraturan / norma, adat istiadat yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sendiri.

### **3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Pemberdayaan adalah upaya membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Jadi konsep pemberdayaan dalam implementasinya perlu keterpaduan antara kehendak pemerintah dan para Stake Holders melalui program-program dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga sasaran pembangunan menjadi terarah dan tepat guna (Mubyarto, 2000).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya kelautan (Saad 2003) Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik sumberdaya alam yang dihadapi. Masyarakat pesisir menghadapi sumberdaya alam yang dapat dikontrol, mobilitas usaha relatif rendah dan unsur resiko tidak terlalu besar, sedangkan nelayan yang bekerja menangkap ikan di laut menghadapi sumberdaya alam yang terbuka dan sulit di kontrol. Keadaan ini menyebabkan mereka harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal. Resikonya menjadi sangat tinggi dan akibatnya nelayan perikanan tangkap memilih karakter yang keras dan tegas (Satria 2000).

Masyarakat pesisir umumnya masih hidup dalam keterbatasan baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik maupun keterbatasan dalam bidang pendidikan dan keterbatasan akses sumberdaya. Keterbatasan ekonomi ini nampak pada tingkat pendapatan masyarakat pesisir yang pada umumnya masih rendah. Keterbatasan sosial terwujud pada ketidakmampuan masyarakat pesisir dalam mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan yang ditujukan oleh kelemahan. Menghadapi kenyataan kehidupan masyarakat pesisir yang seperti itu, maka ada dua pilihan yang dapat dilakukan masyarakat pesisir, yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan

dan kedua yaitu melakukan perlawanan dengan kekerasan. Pilihan kedua tidak mungkin dilakukan mengingat kemiskinan yang dialami dan pendidikan yang dimiliki tidak mampu merespon setiap perubahan sosial ekonomi yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak memperhatikan kondisi riil masyarakat lokal, tetapi didasarkan pada program-program intervensi dari atas. Proyek-proyek intervensi pada hakekatnya telah menghancurkan tatanan masyarakat lokal yang sudah ada sebelumnya. Proyek-proyek tersebut telah mengambil alih berbagai macam hak komunitas dan pemilikan masyarakat dengan dalih untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional.

Dimensi pemberdayaan masyarakat pesisir setidaknya diarahkan pada upaya penguatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang tidak saja berbasis pasar namun juga mempertimbangkan realitas politik, sosial, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam membangun keberadaan diri pribadi, lingkungan, komunitas dan kelompok dalam melakukan proses aktualisasi kemanusiaan yang adil. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat pesisir setidaknya merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan unit-unit sosial ekonomi dalam bentuk perangkat pranata sosial ekonomi dan orang yang ada dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu, yang penting untuk di landaskan adalah bagian mengatasi ketidakmampuan masyarakat pesisir terhadap keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari kondisi kemiskinan yang dialami sebahagian besar masyarakat pesisir

Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui pemberian wewenang kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Pentingnya memperhatikan aspek strategis adaptasi yang

dikembangkan memungkinkan masyarakat pesisir mengatur daya tahan terhadap persoalan-persoalan spesifik seperti fluktuasi harga, ketidakpastian hasil panen. Strategi adaptasi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu diversifikasi dan intensifikasi (Riyadi, 2003).

#### **D. Kerangka Pikir**

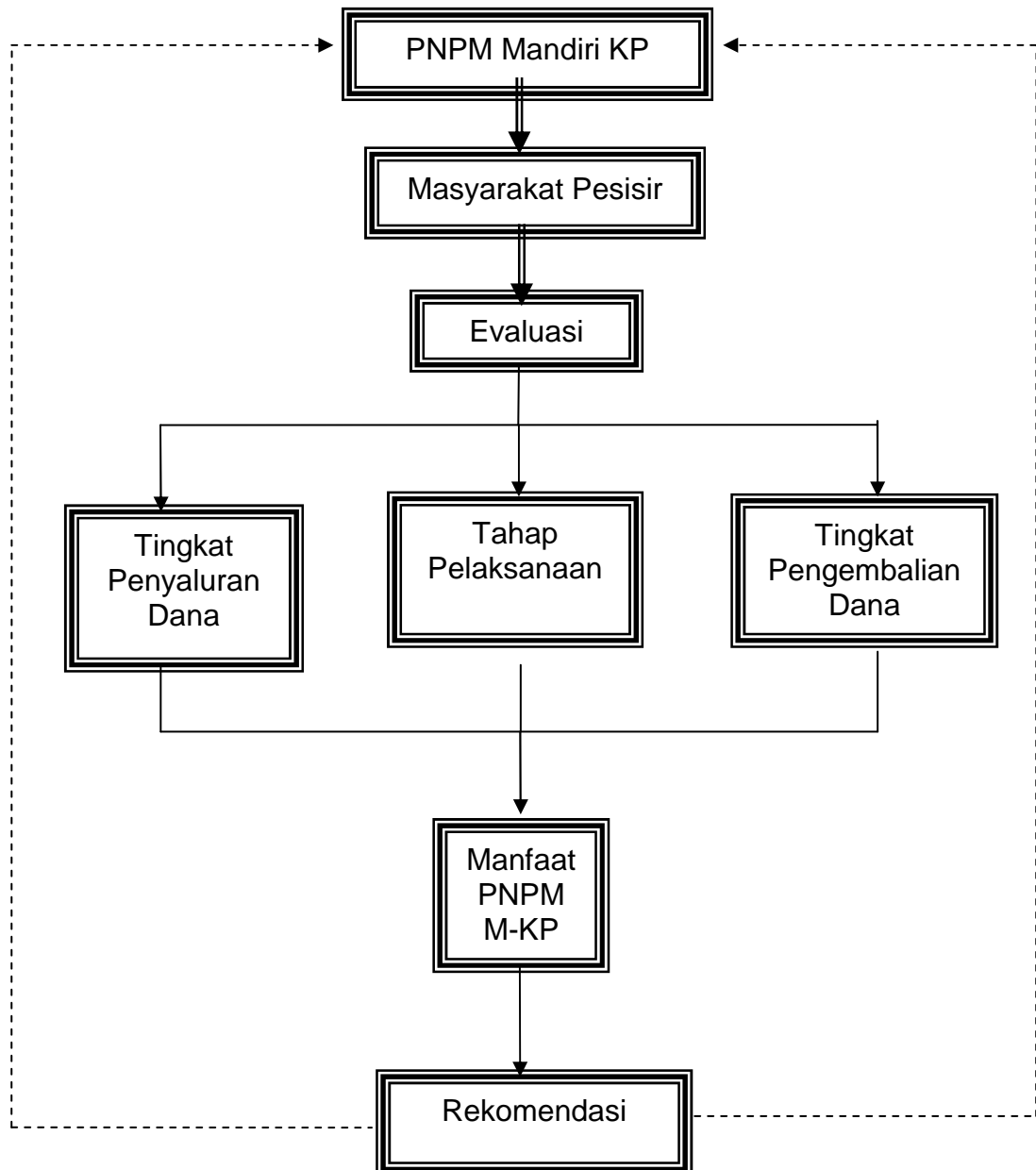
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM Mandiri KP) merupakan suatu program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin kelautan dan perikanan yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial-ekonominya tergantung pada sumberdaya kelautan, yang dapat atau setidaknya mengurangi dan memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi masyarakat pesisir menjadi masyarakat yang mandiri.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-KP diperuntukkan untuk masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok masyarakat pemanfaat khususnya kelompok pembudidaya rumput laut, pembudidaya tambak, penangkapan ikan dan pemasaran Hasil Perikanan

Pengukuran keberhasilan program untuk melihat tingkat keberhasilan program-program yang telah digulirkan dan akan digulirkan diperlukan evaluasi terhadap program tersebut dengan melihat dari tiga aspek yaitu implementasi dari program PNPM M-KP (Tingkat Penyaluran Dana, Tahap Pelaksanaan), tingkat pengembalian dana, serta manfaat program PNPM M-KP terhadap masyarakat pesisir. Pengukuran dengan metode kuantitatif diharapkan dapat lebih mempertajam program pengentasan kemiskinan dan terutama untuk PNPM Mandiri-KP, yang pada akhirnya akan menghasilkan rekomendasi bagi program PNPM M-KP tersebut. Kerangka pikir dari penelitian ini digambarkan secara skematik sebagai berikut :

Gambar 1

## KERANGKA PIKIR





### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2011 berlokasi di Kecamatan Awangpone yang meliputi tiga desa yaitu desa Kajuara, desa Cari Gading dan Desa Mallari, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu daerah penerima bantuan PNPM Mandiri KP.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian survey, yakni penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengambil sampel dari keterwakilan populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data pokok (Singarimbun, 2004).

#### **C. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Observasi (pengamatan) yaitu Pengamatan dilakukan secara langsung dengan mengamati objek dan situasi penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan fenomena yang tidak diperoleh melalui wawancara.
2. Wawancara Mendalam (Interview) yaitu Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas sehubungan dengan permasalahan penelitian, Wawancara ini dikembangkan melalui pertanyaan yang telah disiapkan untuk ditanyakan kepada responden yang dianggap memiliki pengetahuan substansi yang diteliti dengan menggunakan bantuan kuisioner.

3. Dokumentasi dimaksudkan untuk menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif, seperti foto-foto kegiatan, arsip-arsip penting, kebijaksanaan dan lain sebagainya.

#### **D. Jenis dan sumber data**

Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh atau bersumber dari responden melalui pengamatan (observasi) langsung dan wawancara di lokasi penelitian. Setelah itu juga digunakan data sekunder sebagai pendukung data pokok yang dihimpun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone (DKP), dinas terkait, literature dan Badan Pusat Statistik

#### **E. Populasi dan Pengumpulan Sampel**

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang mempunyai karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap sehingga dianggap bisa mewakili populasi (Hasan, 2002).

Populasi dari penelitian ini adalah Kelompok Masyarakat pemanfaat (KMP) program PNPM Mandiri-KP atau masyarakat nelayan penerima dana dari program PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan random sampel yaitu tiap unit populasi diberi nomor kemudian sampel yang diinginkan ditarik secara acak (random) baik dengan sampel random maupun undian (Nasir, 2003). Penentuan besarnya sampel ini ditentukan apabila populasi telah mencapai 100 orang maka sampel yang diambil antara 10% - 15 % dari populasi. Untuk itu diambil sampel sebanyak 15% dari 241 populasi, sehingga didapat 36 sampel. Untuk

mengetahui besarnya sampel pada masing-masing cluster digunakan metode proportional sampling (Supranto, 1992). Metode proportional sampling dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$ni = \left[ \frac{Ni}{N} \right] xn$$

Dimana:

$ni$  : Jumlah sampel dari setiap cluster

$N$  : Jumlah populasi keseluruhan

$Ni$  : Jumlah populasi pada setiap cluster

$n$  : Jumlah sampel dari populasi

Dengan menggunakan rumus tersebut maka, sampel dari setiap populasi dapat dihitung. Jumlah populasi dan sampel dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Jumlah Populasi dan Sampel dengan menggunakan Cluster Random Sampling

No	Desa	Jenis Usaha	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota	Jumlah Sampel
1	Kajuara	Penangkapan Ikan	1	10	2
		Pembudidaya Tambak	2	20	3
		Pembudidaya Rumput Laut	5	50	8
		Pemasaran	1	7	1
		Jumlah	9	87	13
2	Mallari	Penangkapan Ikan	1	10	2
		Pembudidaya Tambak	2	20	3
		Pembudidaya Rumput Laut	7	65	9
		Pemasaran	1	10	2
		Jumlah	11	105	16
3	Carigading	Penangkapan/Pengawasan	2	20	3
		Pembudidaya Tambak	2	20	3
		Pemasaran	1	9	1
		Jumlah	5	49	7
Sub Total			25	241	36

Sumber. Data Primer Hasil Olahan, 2011.

## F. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan mengkonbinasikan analisis kualitatif dan kuantitatif

1. Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan untuk menginterpretasikan dan mengkonfirmasi hasil perhitungan statistik. Analisis kualitatif berupa uraian terperinci berisi penggambaran pola-pola klasifikasi/kategorisasi untuk mempertimbangkan tanggapan/pandangan atau opini/tanggapan informan, maupun hasil pengamatan peneliti di lapangan
2. Analisis kuantitatif adalah perhitungan melalui analisis statistik dengan menggunakan skala likert (Sebagai salah satu skala sikap). Skala ini terdiri atas sejumlah pernyataan yang semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu objek tertentu atau menunjukkan ciri tertentu yang akan diukur (Soehartono, 2008). Untuk pengembangan teknik analisis penelitian yang akan mengarah pada pengukuran sikap, terutama untuk keperluan konfirmasi atau cross check pernyataan informan. Jawaban dari setiap item variable dari skala likert mempunyai gradasi (jenjang atau tingkat), dari sangat positif sampai sangat negative yang dapat berupa kata. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka setiap pernyataan atau pertanyaan dapat menggunakan tiga gradasi atau jenjang yaitu:

**Tabel 3.** Indikator Penilaian Variabel untuk Mengukur Tingkat Keberhasilan PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone

No.	INDIKATOR	NILAI
1	Efektif	(3)
2	Kurang Efektif	(2)
3	Tidak efektif	(1)

Hasil penjumlahan skor setiap jawaban akan dibagi dengan jumlah responden sehingga diperoleh rata-rata skor setiap pertanyaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumus:

$$\text{skor} = \frac{[(F1 \times BN1) + (F2 \times BN2) + (F3 \times BN3)]}{N}$$

Keterangan :

F1,F2,F3	= Frekuensi
BN1, BN2, BN3	= Bobot Nilai
N	= Jumlah Responden

Ordinal yang dimiliki kemudian diubah menjadi data interval, dengan cara mencari rata-rata skor setiap item (indikator terukur) dari variabel independen dan dependen (angka mutlak maupun persentase), dalam klasifikasi

- Efektif : Apabila skor rata-rata dari indikator (2-<3) atau 60% < 100%
- Kurang efektif : Apabila skor rata-rata dari indikator (1 - 2) atau 20% - < 60%
- Tidak efektif : Apabila skor rata-rata dari indicator (<1) atau < 20%

### G. Konsep Operasional

- Evaluasi adalah proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan
- Pemberdayaan masyarakat adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
- Masyarakat pesisir adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama disuatu daerah tertentu yang disebut pantai.
- PNPM Mandiri KP adalah program yang diberikan kepada kelompok masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan modal usaha yang bersumber dari dana APBN.
- TP adalah tenaga pendamping yang diikut sertakan pada program PNPM Mandiri KP dalam proses pendampingan kelompok masyarakat pemanfaat.

- Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) adalah kelompok masyarakat yang terpilih untuk mendapatkan dana dari program PNPM Mandiri KP.
- Konsultan manajemen (KM) adalah orang atau lembaga yang ditunjuk oleh wilayah penerima dana PNPM Mandiri KP dalam mengkoordinir, memonitoring, mengevaluasi jalannya program PNPM Mandiri KP di wilayah tersebut.
- Tepat sasaran yaitu dana yang diberikan sampai kepada masyarakat pesisir yang membutuhkan
- Tepat jumlah yaitu dana yang diterima sesuai dengan kebutuhan mpdal untuk menjalankan suatu usaha
- Tepat waktu yaitu penyaluran dana kepada kelompok masyarakat pemanfaat tepat pada saat masyarakat membutuhkan
- Efektifitas adalah ukuran keberhasilan yang harus dijadikan acuan dalam mencapai tujuan.
- Kesejahteraan adalah suatu ideologi yang bercorak materialistik yang menempatkan capaian materi dalam memenuhi kebutuhan dalam hal ini tingkat keuntungan diperoleh dari usaha produktif

#### **IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Keadaan Geografi dan Administrasi Daerah**

Kecamatan Awangpone merupakan salah satu kecamatan pantai dari 10 (sepuluh) kecamatan pantai yang ada di Kabupaten Bone dengan luas wilayah sebesar 110,70 km<sup>2</sup> atau 2,43% dari luas keseluruhan Kabupaten Bone yaitu 4.559 km<sup>2</sup>. Sedangkan luas Desa Mallari 7,57 km<sup>2</sup>, Desa Kajuara 4,75 km<sup>2</sup>, Desa Carigading 4,50 km<sup>2</sup>. Jarak ibukota Kecamatan Awangpone ke Kabupaten Bone sekitar 8 km. Kecamatan Awangpone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga 500 meter dari permukaan laut. Kecamatan Awangpone terdiri atas 17 Desa dan 1 Kelurahan, dari 17 desa yang ada, 5 diantaranya merupakan desa pesisir yaitu Desa Mallari, Kajuara, Carigading, Unra dan Kading.

Batas-batas wilayah Kecamatan Awangpone adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palakka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riattang Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tellu Siattinge

##### **B. Kegiatan Ekonomi**

Kegiatan perekonomian di Kecamatan Awangpone cukup maju dan berkembang terutama dibidang pertanian, perikanan dan perkebunan sebagai mata pencaharian pokok penduduk / masyarakat. Khususnya dibidang perikanan dan kelautan, usaha perekonomian sebagian penduduk adalah nelayan, pembudidaya ikan/rumput laut dan pemasaran.

Distribusi pemasaran hasil perikanan dan kelautan masih sebagian besar dijual di pasaran lokal dan tengkulak yang menjadi pengumpul hasil produksi. Para pengumpul ini kemudian memasarkan kepada perusahaan yang ada di luar Kabupaten Bone sehingga jalur distribusi pemasaran sangat panjang. Disamping itu juga pemasaran sebagian hasil produksi seperti rumput laut melalui koperasi BDS Kospermindo yang ada di Kabupaten Bone.

Lembaga pembiayaan yang ada selain perbankan adalah Koperasi baik koperasi umum maupun koperasi perikanan seperti Koperasi LEPP-M3 Mitra Mina Bahari yang telah menjadi penopang usaha sebagian masyarakat pelaku usaha perikanan dan kelautan termasuk di Kecamatan Awangpone berupa pemberian kredit lunak kepada nelayan, pembudidaya dan pemasaran ikan.

### **C. Keadaan Penduduk**

Penduduk merupakan orang-orang yang bertempat tinggal atau berdiam di suatu daerah pada waktu tertentu yang dapat menjadi gambaran potensi kemampuan penduduk dalam menjalankan suatu usaha yang berhubungan dengan kehidupannya.

Penduduk merupakan modal pembangunan suatu daerah karena fungsinya sebagai pelaksana pembangunan dan juga sebagai penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Penduduk juga merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan suatu wilayah sebab adanya pembangunan tidak terlepas dari keterlibatan serta partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.



Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Kecamatan Awangpone pada tahun 2010 tercatat 30.676 jiwa terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 14.009 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 16.667 jiwa yang tersebar di 1 kelurahan dan 18 desa. Berikut disajikan keadaan penduduk pada kecamatan Awangpone, sebagaimana tertera pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 4.** Komposisi Penyebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Mallari, Carigading dan Kajuara

No	Desa	Keadaan Jumlah Penduduk		Jumlah (Orang)	Persentase(%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kajuara	748	793	1.541	29,81
2	Mallari	1.197	1.360	2.557	49,47
3	Carigading	522	549	1.071	20,72
<b>Jumlah</b>		<b>2.467</b>	<b>2.702</b>	<b>5.169</b>	<b>100</b>

*Sumber: Kecamatan Awangpone, 2011*

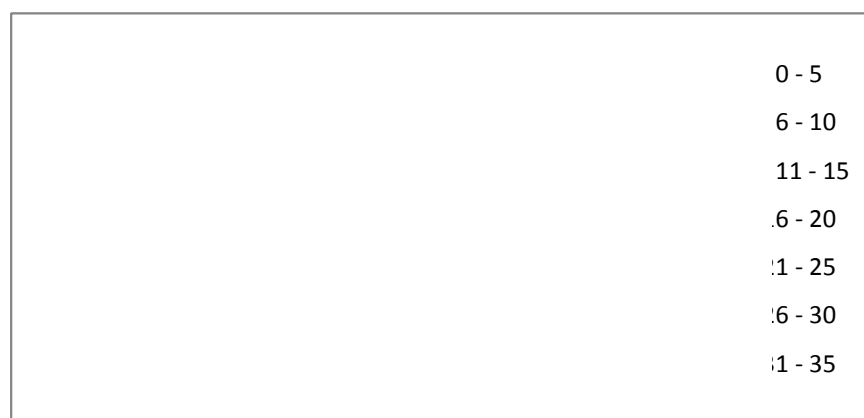
Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan tercatat 5.169 jiwa penduduk yang bermukim di desa Mallari, Carigading, dan Kajuara. Dari jumlah tersebut, desa Mallari yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yakni 2.557 jiwa atau 49,47% dari total penduduk di tiga desa tersebut. Kemudian disusul oleh desa Kajuara yakni 1.541 jiwa, sedangkan yang terkecil jumlah penduduknya yaitu desa Carigading yakni 1.071 jiwa. Pada tabel terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan di kecamatan Awangpone lebih dominan dibandingkan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan berjumlah 2.702 jiwa sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 2.467 jiwa.

**Tabel 5.** Jumlah Penduduk dirinci Menurut Golongan Usia

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	0 – 5	562	10,87
2	6 – 10	588	11,38
3	11 – 15	548	10,60
4	16 – 20	479	9,27
5	21 – 25	402	7,78
6	26 – 30	395	7,64
7	31 – 35	346	6,69
8	36 - 99	1.849	35,77
<b>Jumlah</b>		<b>5.169</b>	<b>100</b>

Sumber: *Kecamatan Awangpone, 2011*

Dari tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 36-99 tahun menempati urutan pertama sebanyak 1.849 jiwa dan yang terkecil terdapat pada golongan usia 31-35 tahun yaitu sebanyak 346 jiwa.

**Gambar 2.** Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia

Dari gambar 2, diketahui bahwa usia 0 – 5 yaitu sebanyak 11%, usia 6 – 10 sebanyak 11%, usia 11 – 15 sebanyak 10%, usia 16 – 20 sebanyak 9%, usia 21 - 25 sebanyak 8%, usia 26 – 30 sebanyak 8%, usia 31 – 35 sebanyak 7%, usia 36 – 99 sebanyak 36%. Dari jumlah penduduk berdasarkan golongan usia pada usia 36 – 99 memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi sedangkan usia 31 - 35 memiliki jumlah penduduk yang paling rendah.

#### D. Sarana dan Prasarana Daerah

Kehidupan dalam bermasyarakat selalu timbul berbagai kebutuhan sosial, oleh karena itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka sarana dan prasarana sosial sangat dibutuhkan. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Awangpone, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana di Kecamatan Awangpone

No.	Jenis	Jumlah(unit)
1	Sarana Peribadatan	
	Mesjid	56
	Gereja	2
	Pura	1
2	Sarana Kesehatan	
	Pustu	7
	Polindes	6
	Posyandu	37
3	Sarana Pendidikan	
	Taman Paditungka	4
	TK	20
	SD	23
	SMP	8
	SMA	3
	Taman Bacaan	3
4	Sarana Umum Lainnya	
	Pasar	14
	Lapangan Olahraga	19
	Tempat sampah Umum	2
	MCK umum	13
5	Pengelola Sarana dan Prasarana	
	Kader Posyandu	37
	Kader Paditungka	4
	Dukun bayi	41

*Sumber: Kecamatan Awangpone, 2011*

Tabel 6 terlihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Bantaeng cukup tersedia, hal tersebut dapat terlihat dari jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang ada yaitu terdapat lima jenis sarana dan prasarana seperti prasarana peribadatan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, sarana

umum lainnya dan pengelola sarana dan prasarana dengan jumlah keseluruhan 300 unit.

### E. Karakteristik Responden

Komunitas penerima bantuan dana PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone terutama tersebar di tiga desa yaitu desa Mallari, Carigading, dan Kajuara yang berjumlah sebanyak 25 kelompok. Dari jumlah tersebut, terdapat empat jenis usaha yang dijalankan oleh kelompok penerima bantuan dari PNPM Mandiri KP yakni usaha budidaya rumput laut, usaha penangkapan ikan, pemasaran hasil perikanan dan pembudidayaan tambak. Selanjutnya akan dilihat identitas responden berdasarkan umur, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan mereka.

#### 1. Umur

Umur merupakan faktor yang cukup berperan dalam menentukan kesuksesan suatu usaha yang digeluti. Hal ini disebabkan karena umur berpengaruh terhadap produktivitas kerja yang sangat erat kaitannya dengan kemampuan fisik, mental serta pola pikir dalam menentukan dan menjalankan pola manajemen usaha yang diterapkan.

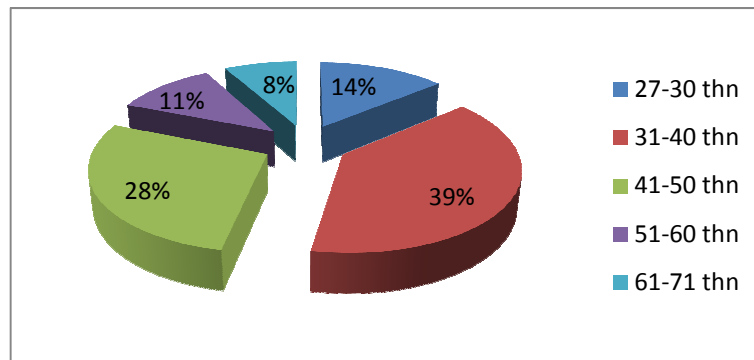
**Tabel 7.** Karakteristik Responden Pemanfaat Dana PNPM Mandiri KP Berdasarkan Tingkat Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	27 - 30 tahun	5	14
2	31 - 40 tahun	14	39
3	41 - 50 tahun	10	28
4	51 - 60 tahun	4	11
5	61 - 71 tahun	3	8
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

*Sumber. Data Primer Hasil Olahan, 2011*

Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa kelompok yang terlibat sebagai responden di dominasi umur 31 – 40 tahun sebanyak 14 orang. Responden yang berumur antara 41-50 tahun sebanyak 10 orang, umur 27 – 30 tahun sebanyak

5 orang, umur 51- 60 tahun sebanyak 4 orang dan umur 61-71 tahun sebanyak 3 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa responden masih dalam kisaran umur yang produktif. Selanjutnya untuk mengetahui persentase umur responden dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Diagram Karakteristik Responden Pemanfaat Dana PNPM Mandiri KP Berdasarkan Umur

Gambar 3 di atas terlihat bahwa persentase responden yang umurnya antara 27-30 tahun sebesar 14 %, kisaran umur 31 – 40 tahun sebesar 39 %, umur 41-50 tahun sebesar 28 %, umur 51-60 tahun sebesar 11 % dan umur 61-71 tahun sebesar 8 % dari jumlah responden.

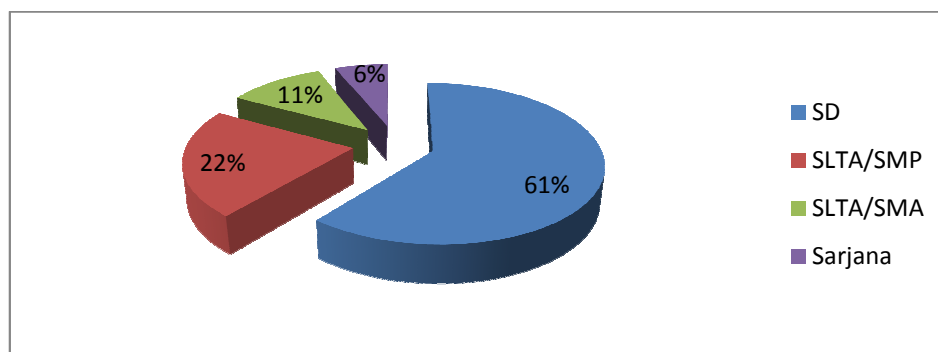
## 2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir seorang nelayan. Meskipun sebenarnya sulit untuk mengukur hubungan yang sesungguhnya antara tingkat pendidikan formal dengan cara berfikir nelayan. Pendidikan mempengaruhi nelayan dalam mengadopsi teknologi dan keterampilan manajemen untuk mengelola usahanya. Semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan pola pikir semakin rasional, sehingga nelayan lebih mudah untuk menerima teknologi baru untuk peningkatan hasil tangkapan.

**Tabel 8.** Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
	SD	22	61
	SLTP/SMP	8	22
	SLTA/SMA	4	11
	Sarjana	2	6
	Jumlah	36	100

Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2011

**Gambar 4.** Diagram Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 8 dan Gambar 4 terlihat bahwa umumnya tingkat pendidikan responden hanya sampai tingkat SD yaitu sebanyak 22 orang atau sekitar 61 %, kemudian tingkat SLTP sebanyak 8 orang atau 22%, dan pada tingkat SLTA sebanyak 4 orang atau 11 % selanjutnya tingkat sarjana sebanyak 2 orang atau 6 % dari jumlah keseluruhan responden. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa, tingkat pendidikan responden umumnya masih rendah.

Responden pada umumnya tidak tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang disebabkan seperti minat untuk sekolah sangat rendah, dan kondisi ekonomi yang terbatas. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada pengetahuan mereka untuk mengembangkan usaha serta mengelola permodalan yang diberikan pada program PNPM Mandiri KP.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat wilayah pesisir tersebut, menyebabkan sulit untuk mengangkat status sosial ekonomi dan ketidakmampuan mereka untuk dapat mengelola potensi dan sumberdaya yang besar karena permasalahan pengelolaan yang berhubungan dengan tingkat pendidikan. Karakteristik tingkat pendidikan formal merupakan salah satu variabel sosial ekonomi dalam penelitian ini. Dimana akan mempengaruhi kemampuan, sikap dan perilaku responden dalam memahami program. Masyarakat pesisir yang tingkat pendidikannya tinggi akan lebih mudah dan responsive terhadap perubahan dan inovasi baru.

### 3. Tanggungan Keluarga

Tanggungan keluarga dalam suatu rumah tangga adalah tanggungan keluarga yang terdiri dari kepala rumah tangga, istri dan anak serta anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan kepala keluarga. Anggota keluarga yang menjadi tanggungan tersebut merupakan salah satu modal tenaga kerja sebab mereka akan ikut membantu dalam kegiatan usaha. Semakin besar jumlah tanggungan dalam sebuah rumah tangga, akan mempengaruhi besarnya pengeluaran

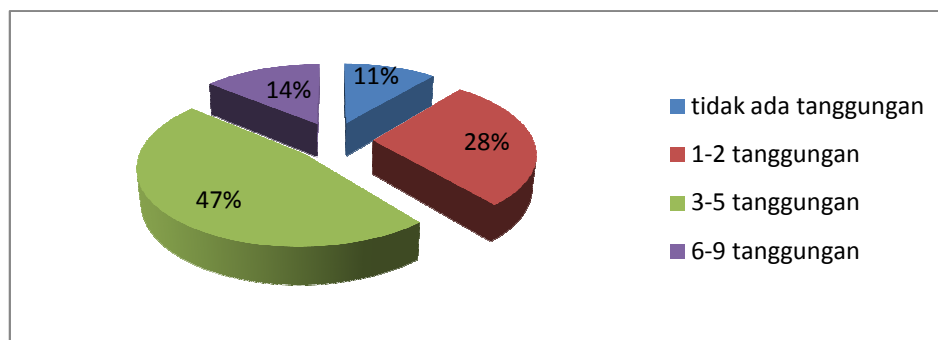
**Tabel 9.** Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga di Kecamatan Awangpone

No	Tanggungan Keluarga	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak ada tanggungan	4	11
2	1-2 orang	10	28
3	3-5 orang	17	47
4	6-9 orang	5	14
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2011

Tabel 9 terlihat bahwa pada umumnya responden memiliki jumlah tanggungan keluarga antara 6-9 orang sebanyak 5 orang, 3 – 5 orang sebanyak 17 orang, tanggungan keluarga 1 – 2 orang sebanyak 10 orang dan yang belum

memiliki tanggungan sebanyak 4 orang. Selanjutnya untuk mengetahui persentase jumlah tanggungan responden dapat dilihat pada Gambar 5.



**Gambar 5.** Diagram Persentase Jumlah Tanggungan Responden

Gambar 5 di atas terlihat bahwa 47% responden memiliki tanggungan keluarga sebanyak 3-5 orang, 28% memiliki tanggungan keluarga sebanyak 1 – 2 orang dan 14% memiliki tanggungan keluarga sebanyak 6-9 orang, serta 11 % responden yang belum memiliki tanggungan keluarga. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga dapat disebabkan karena tingkat kelahiran pada keluarga masyarakat pesisir masih tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, sehingga pandangan tentang banyak anak maka banyak rezeki masih berkembang. Selain itu banyaknya tanggungan juga disebabkan karena adanya orang lain yang hidup bersama-sama dalam satu atap / rumah tangga.

Widodo dkk (2006), menyatakan bahwa komponen sistem manusia dalam perikanan secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi nelayan, rumah tangga dan komunitasnya, pengolah (pasca panen) dan pemasaran, serta lingkungan sosial ekonomi. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi dalam mempengaruhi pola pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan. Keseluruhan komponen tersebut membentuk komunitas masyarakat pesisir sebagai satu kesatuan.



## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum PNPM Mandiri KP sebagai Program Pemberdayaan Nasional**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM M-KP) merupakan program yang dilaksanakan melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Penanggung jawab dan pembina program di tingkat nasional adalah Direktur Jenderal kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (Dirjen KP3K), Sedangkan Dinas kelautan dan perikanan kabupaten/Propinsi sebagai penanggung jawab operasional program.

Kegiatan PNPM M-KP diinisiasi untuk mengatasi berbagai permasalahan akibat krisis ekonomi, kenaikan BBM, kesenjangan, kemiskinan, dan rendahnya kapasitas sumberdaya manusia (masyarakat) pesisir serta upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tujuan Program PNPM M-KP yang ingin dicapai sebagai program yang diintroduksi ke masyarakat, terdiri dari : Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat, Memberdayakan kelembagaan masyarakat untuk pengembangan kegiatan usahanya, Meningkatkan kemampuan usaha kelompok masyarakat, Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, Meningkatkan infrastruktur lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Meningkatkan kemitraan kelembagaan masyarakat dengan sumber permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin kelautan dan perikanan yang tergabung dalam kelompok usaha yaitu usaha penangkapan ikan, usaha pemasaran hasil perikanan, usaha budidaya rumput laut dan usaha budidaya tambak.

.Konteks Swamitra Mina merupakan salah satu unit usaha Koperasi LEPP M3 yang bergerak dibidang permodalan bagi masyarakat pesisir berbasis sistem teknologi perbankan yang online. LKM Swamitra Mina hasil kerjasama antara LEPP M3 dengan Bank Bukopin sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan secara profesional, transparan serta dapat dipantau setiap saat.

Kesimpulan dari PNPM M-KP sesungguhnya merupakan program pemerintah yang diintroduksi untuk menjadikan masyarakat pesisir sebagai masyarakat yang memiliki budaya wirausaha dalam mengelola sumberdaya alamnya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru secara lokal, regional maupun nasional yang berbasis sumberdaya alam.

#### **1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM M-KP) di Kecamatan Awangpone Tahun 2009**

Pelaksanaan program PNPM di Kecamatan Awangpone merupakan suatu program pemerintah yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang ada di Kecamatan Awangpone melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan.

Penanggung jawab operasional PNPM M-KP di Kecamatan Awangpone adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone. Dalam melaksanakan program PNPM M-KP, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone berkoordinasi dengan instansi terkait, KPKN, TKPKD Propinsi dan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti pihak LSM dan juga mitra-mitra kerja lainnya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone melalui dua tahapan, yaitu: (a) Sosialisasi Program, dan (b) Kegiatan Jasa Konsultan

### **a. Sosialisasi Program**

Pelaksanaan program ini diawali dengan tahap sosialisasi, tahap dimana masyarakat diberikan pengenalan dan pemahaman dasar tentang konsep PNPM Mandiri KP. Tahap ini memegang peranan yang cukup penting karena merupakan langkah penentu pelaksanaan program. Hal-hal yang disampaikan meliputi kebijakan, pengertian, tujuan, konsep, mekanisme dan hasil-hasil pelaksanaan PNPM Mandiri agar terbangun pemahaman, kepedulian, serta dukungan terhadap PNPM Mandiri. Segala pengetahuan dan pemahaman yang diterima oleh masyarakat pada tahap ini akan menjadi alasan penerimaan ataupun penolakan masyarakat sasaran akan pelaksanaan PNPM Mandiri KP di kecamatan Awangpone.

Kegiatan Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) Tahun 2009 di Kabupaten Bone dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2009 dan bertempat di Wisma Fahdil Jl. Mesjid Raya Watampone dan Kegiatan Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) Tahun 2010 di Kabupaten Bone dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 April 2010 dan bertempat di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone.

Peserta Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) berjumlah 50 orang yang terdiri dari wakil masyarakat dari beberapa kecamatan pantai, pengurus kelompok penerima PNPM Mandiri-KP, aparat pemerintah/aparat yang terkait, stakeholder terkait dan penyuluh kelautan dan perikanan kecamatan sasaran program.

Substansi dari kegiatan sosialisasi PNPM Mandiri-KP adalah memberikan penjelasan secara rinci dan transparan mengenai PNPM Mandiri-KP kepada semua pihak yang terkait dan bagaimana mekanisme dari program tersebut.

### 1). Implementor

Implementor adalah individu, kelompok, lembaga atau unit pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri KP (PNPM M-KP) yang memberi arahan, motivasi, bimbingan dan pelatihan, dan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program PNPM M-KP dilapangan. Implementor pada program PNPM M-KP di Kabupaten Bone Kecamatan Awangpone adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone yang berperan sebagai Konsultan Manajemen Kota (KMK).

Komponen yang dianalisis pada unit amatan Implementor ada beberapa cara, yaitu : (a) Cara Penyajian Implementor; (b) Metode yang dipakai; (c) Penguasaan materi, serta; (4) Pendampingan Implementor pada setiap kegiatan lapangan.

Penjelasan dari beberapa komponen yang dimaksud diuraikan sebagai berikut :

#### (a). Cara Penyajian Implementor

Dalam teori komunikasi publik dijelaskan bahwa, cara penyajian atau penyampaian suatu materi sangatlah mempengaruhi terhadap proses penerimaan atau internalisasi dari nilai-nilai materi tersebut kepada individu ataupun kelompok yang menerimanya. Penyajian atau penyampaian materi yang baik dan sistematis serta memahami latar belakang penerima atau peserta, diasumsikan akan lebih berhasil dan berdaya guna terhadap pemahaman penerima atau peserta dalam kegiatan tersebut. Kegagalan dalam penyampaian informasi sedikit banyak dipengaruhi oleh penggunaan kata/kalimat yang sukar dimengerti oleh *audiens*. Artinya, materi dan bahasa dalam penyampaian materi harus disesuaikan dengan kapasitas orang yang diinformasikan. Penggunaan kata/kalimat yang ilmiah biasanya dilakukan dalam proses sosialisasi atau pelatihan dengan latar belakang peserta yang memiliki tingkat pendidikan tinggi.

Konteks sosialisasi dan pelatihan yang ditujukan kepada masyarakat desa, dengan latar belakang pendidikan yang rendah, penggunaan kata/ kalimat harus disesuaikan dengan kapasitas mereka. Jika seharusnya menggunakan bahasa teknis, maka kata/kalimat yang dimaksudkan harus sedapat mungkin disederhanakan, atau diartikan dalam bahasa daerah setempat sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat daerah tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dilapangan, ditemukan bahwa penggunaan kata/kalimat sukar telah menjadi kesepakatan untuk disederhanakan oleh semua penyaji materi seperti yang diungkapkan oleh seorang anggota LSM (AH, 32 Tahun) sebagai berikut :

*“...dalam mengawali program ini, disetiap agenda sosialisasi, pelatihan maupun rapat-rapat teknis yang diselenggarakan di desa, kami berupaya semaksimal mungkin untuk menggunakan kata/kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh peserta yang tujuannya agar mereka dengan mudah memahami tujuan program ini...”*

Hal ini diperkuat oleh pernyataan seorang pemuka masyarakat kecamatan Awangpone, yang menyatakan bahwa :

*“...disetiap pelatihan, hampir semua pelatih yang membawakan materinya selalu menggunakan kata/kalimat-kalimat yang sangat sederhana dan ini memudahkan kami untuk mengetahui tujuan materi tersebut, walaupun ada bahasa-bahasa yang sulit dipahami, pelatih berusaha menjelaskannya dengan bahasa daerah...”*

Hal kedua juga yang dapat diindikasikan untuk mengetahui tentang cara penyajian implementor adalah, apakah dalam penyajian materi, yang disampaikan ke peserta, implementor menggunakan media alat bantu untuk menjelaskan materinya. Konteks ini menjadi penting dalam efektifitas penyampaian materi/sosialisasi program karena media alat bantu merupakan alat yang komunikatif dalam pelaksanaan proses pembelajaran, baik oleh pelatih maupun peserta. Secara teoritis dikatan Hamalik (2000) bahwa media alat bantu dalam suatu pelatihan memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi

sebagai unsur penunjang proses pembelajaran, menggugah gairah dan motivasi belajar, dengan mempertimbangkan ;

- 1). Banyak konsep-konsep dalam bahan pelatihan yang memerlukan persamaan persepsi bagi para peserta. Berbeda persepsi dapat menimbulkan salah tafsir dan mengakibatkan salah dalam tindakan selanjutnya.
- 2). Dalam bidang-bidang tertentu yang disampaikan pada pelatihan terdapat proses-proses kerja penalaran yang sangat lambat, sehingga dengan bantuan media pembelajaran/alat bantu maksud-maksud yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan cepat
- 3). Banyak hal yang abstrak ternyata sulit diamati dengan penginderaan.

Keterangan yang diperoleh dari informan, penggunaan alat bantu oleh implementor dalam hubungannya dengan penyajian materi dianggap sangat efektif, karena masyarakat sangat terbantuan untuk lebih mudah dan mengerti memahami apa yang disampaikan implementor.

Berikut penuturan informan akan fenomena tersebut :

*"...seingat saya, banyak sekali alat bantu yang digunakan oleh penyelenggara untuk menjelaskan bahan pelajarannya, sepengetahuan saya, yang digunakan pada waktu itu adalah perahu, jarring, kail, dll." Tetapi lebih lanjut menurut tokoh masyarakat ini, alat – alat tersebut banyak dipakai pada waktu praktek lapangan..."*

Informan lain, seorang warga yang mewakili kelompok masyarakat Kecamatan Awangpone menyatakan bahwa :

*"...saya sangat berterima kasih atas program ini, kami juga sangat puas dengan apa yang diberikan oleh penyaji materi, bahkan sekarang ini kelompok kami telah berkembang, karena telah tahu tentang cara mengelolah hasil tangkapan yang tidak laku dijual, yaitu pada waktu lalu hanya bisa dibuat ikan asin sekarang bisa dibuat abon ikan..."*

### **(b). Metode yang Dipergunakan**

Metode dalam suatu proses belajar mengajar ataupun pelatihan sangat menentukan untuk memberi kemudahan kepada individu maupun kelompok agar dapat lebih mengerti dan memahami apa yang disampaikan, sehingga pencapaian tujuan dapat tercapai. Dalam upaya memberikan pengenalan dan pemahaman program PNPM M-KP serta kegiatan pelatihan sebelum pelaksanaan program maka ada beberapa metode yang dipakai oleh implementor dalam kegiatan yang dimaksud, yaitu; Metode ceramah (penyampaian secara lisan), Metode diskusi (pembahasan dua arah) serta Metode praktek lapangan (mencoba penerapan di lapangan).

Diasumsikan bahwa metode yang dipakai oleh implementor telah memberikan implikasi yang baik terhadap kelompok masyarakat di Kecamatan Awangpone, khususnya Desa Kajuara, Mallari dan Carigading, meskipun dari ketiga metode tersebut ada yang sangat disenangi dan kurang diminati oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap metode yang dimaksudkan di atas, berikut diuraikan ketiga metode tersebut sebagai berikut :

(a) Penggunaan Metode Ceramah. Dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pembentukan kelompok dan penentuan jenis kegiatan, metode ceramah merupakan salah satu dari tiga metode yang dipakai oleh implementor, metode ceramah dipakai dalam hal menjelaskan akan materi – materi, dan hal – hal lain pada tahapan sosialisasi pembentukan kelompok dan penentuan jenis kegiatan. Keterangan yang diperoleh dari sejumlah informan dengan kesimpulan yang sama, dikatakan bahwa metode ceramah tidak terlalu diminati oleh masyarakat. Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan sehubungan

dengan respon dari responden yang kurang menyukai metode ceramah, yaitu :

- (1) Responden telah lama meninggalkan bangku sekolah sehingga hal tersebut perlu penyesuaian lagi.
- (2) Responden merupakan masyarakat desa yang tingkat pendidikannya rendah.
- (3) Penggunaan metode ceramah relatif satu arah sehingga membuat responden merasa jenuh.

Ketiga hal ini diasumsikan sebagai faktor determinan, sehingga penggunaan metode ceramah haruslah diatur mekanisme intensitas waktunya dan dikombinasikan dengan metode-metode yang lain. Secara teoritis dikemukakan oleh Surysubroto (1997), bahwa ada keuntungan dan keburukan metode ceramah, yaitu : *Keuntungannya*, komunikator dapat menguasai seluruh kelas/komunikan, serta organisasi kelas sederhana. *Keburukan*, komunikator sukar mengetahui sampai dimana komunikan telah mengerti pembicaraannya, serta komunikan menginterpretasi lain dari hal yang dimaksudkan oleh komunikator.

Dari analisis yang dilakukan, ketertarikan masyarakat atau responden dengan metode diskusi disebabkan karena dengan metode diskusi, masyarakat dapat dengan bebas mengungkapkan apa yang menjadi kendala, hambatan serta apa yang diharapkan oleh responden atau masyarakat dengan adanya program PNPM M-KP di desa mereka.

Hal ini sesuai dengan tujuan dalam penggunaan metode diskusi oleh pihak penyelenggara, yaitu untuk menggali informasi – informasi yang penting tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta jenis kegiatan apa yang masyarakat inginkan dapat tergali dalam pendekatan metode yang dimaksud.

Secara teoritis telah dijelaskan oleh Surysubroto (1997) bahwa pengertian metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran/materi dimana guru/pelatih memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok siswa/peserta untuk mengadakan perbincangan guna mengumpulkan pendapat,



membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Pendasaran ini telah sesuai dengan tujuan metode diskusi yang diselenggarakan dalam kegiatan sosialisasi, pembentukan kelompok maupun penentuan jenis kegiatan.

Berikut penuturan salah seorang warga masyarakat Kecamatan Awangpone berdasarkan fenomena tersebut :

*“...kalau diskusi kami bisa saling tukar informasi dan pengalaman dengan peserta yang lain, terutama antara nelayan yang satu dengan yang lainnya, sehingga kami dapat bekerja sama pada waktu pelaksanaan kegiatan PNPM M-KP nantinya...”*

Informan lain (ZS, 40 Tahun) nelayan :

*“...pada saat diskusi, kami dapat mengutarakan pengalaman kami tentang apa yang kami alami dilapangan dengan teori-teori yang disampaikan oleh sarjana-sarjana perikanan. di dalam diskusi, kami juga dapat menentukan jenis kegiatan apa yang akan kami laksanakan sesuai dengan kesepakatan kelompok kami....”*

Hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat antusias dan senang dengan penggunaan metode diskusi dalam proses perencanaan, terutama dalam menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelompok terutama pada tahapan menentukan jenis kegiatan.

### **(c). Pendampingan Implementor**

Pendampingan merupakan suatu upaya untuk mempermudah individu maupun kelompok dalam memahami suatu hal yang belum diketahuinya. Pada program PNPM M-KP, proses pendampingan sangat diperlukan mengingat kelompok masyarakat baru mengenal program tersebut. Pendampingan implementor pada setiap tahapan kegiatan menjadi hal yang sangat diperlukan oleh responden, karena kehadiran implementor disetiap kegiatan, responden merasa diperhatikan dan merasa bahwa memang kehadiran mereka juga sangat diperlukan. Proses pendampingan yang kontinyu juga dapat menambah kedekatan implementor dengan kelompok, sehingga lebih mempercepat proses

belajar dan tidak menambah kecanggungan antara implementor dengan kelompok masyarakat.

Hal ini mengindikasikan bahwa dalam prosesnya, implementor tidak pernah lalai akan tugas yang diberikan kepada mereka, sehingga masyarakat merasa bahwa memang mereka benar-benar diperhatikan. Dengan demikian, kehadiran implementor pada setiap kegiatan menurut responden sangat bermanfaat sekali karena responden merasakan bahwa kehadiran mereka juga sangat diperlukan demi kelancaran kegiatan dilapangan. Kehadiran implementor membuat masyarakat puas karena pada dasarnya implementor merupakan pelaksana dan penanggung jawab program PNPM M-KP

Menurut responden kehadiran dan pendampingan yang dilaksanakan oleh implementor pada setiap kegiatan PNPM M-KP berbeda dengan program-program pemerintah sebelumnya, pendamping hanya datang sekali sebulan bahkan jarang sekali, sehingga bila ditemui masalah teknis dilapangan masyarakat tidak bisa atau kurang bisa maksimal mengatasinya.

Hal senada juga dikemukakan oleh seorang anggota kelompok masyarakat yang juga dahulu pernah ikut dalam program IDT, yang menyatakan bahwa :

*“... sebaiknya pendampingan terus dilaksanakan, karena belajar dari pengalaman IDT, pendamping IDT hanya datang kalau mau buat laporan, selanjutnya tidak pernah muncul...”*

Pernyataan-pernyataan tersebut di atas dapatlah diindikasikan bahwa pendampingan sebaiknya sifatnya kontinyu. Pendampingan sangat diperlukan oleh kelompok masyarakat pemanfaat karena mereka merasa perlu dibina lebih lanjut sehingga program PNPM M-KP dapat berguna dan bermanfaat bagi kelompok masyarakat Kecamatan Awangpone.

## 2). Materi

Materi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM M-KP) ini terdiri dari materi-materi, yaitu : Pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan; Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone; Program Pembangunan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri-KP, serta Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya.

Materi-materi yang diberikan pada saat sosialisasi, juga diberikan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengembangan usaha dari kelompok masyarakat, seperti pengelolaan manajemen sederhana dan pengelolaan hasil tangkapan yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama, seperti pembuatan abon ikan, ikan asap, dan lain sebagainya.

Analisis kesesuaian materi-materi pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan pendekatannya dilihat dari persepsi masyarakat tentang : kesesuaian materi dengan kebutuhan masyarakat; kesesuaian materi dengan tujuan program serta kesesuaian materi dengan kebutuhan masyarakat pemanfaat.

Materi program adalah materi yang diberikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi dan pelatihan. Materi-materi tersebut haruslah merupakan materi-materi yang memang diperlukan oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Keterangan yang diperoleh bahwa materi-materi yang merupakan materi pusat, dikondisikan dengan konteks lokal/daerah, sehingga sesuai dengan kondisi gambaran yang sesungguhnya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena program-program pemerintah yang merupakan program langsung seringkali menyamaratakan materi-materi yang diberikan untuk semua daerah atau sifatnya general.

### 3). Target Group

Target Group atau kelompok sasaran adalah kelompok yang merupakan sasaran pelaksanaan suatu kegiatan program. Pada program PNPM M-KP, sesuai dengan ketentuan yang diatur maka target group atau kelompok sasarannya adalah pemanfaat dana ekonomi produktif masyarakat, yaitu kelompok masyarakat pesisir dan anggota masyarakat lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan sumber daya pesisir dan laut dengan prioritas utama dari keluarga petani ikan/nelayan miskin.

Kelompok sasaran pada program PNPM M-KP di Kecamatan Awangpone adalah keluarga nelayan skala usaha kecil. Hal-hal yang dikaji pada unit amatan target group atau kelompok sasaran pada program PNPM M-KP ini adalah : kehadiran dalam mengikuti kegiatan dan keterlibatan dalam kegiatan.

Kehadiran Target Group dalam mengikuti kegiatan, sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman individu atau kelompok, terhadap sesuatu bahan/hal atau program yang akan diterima. Keaktifan individu atau kelompok untuk selalu hadir dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan, akan semakin menambah pemahaman mereka akan pentingnya program tersebut dilakukan serta akan mendapatkan pembekalan-pembekalan yang berkaitan dengan pelaksanaan program, yang bertujuan untuk memotivasi mereka dan mendayagunakan potensi yang dimiliki, baik potensi alam maupun sumber daya manusia mereka.

Intensitas kehadiran juga merupakan suatu indikator dalam melihat apakah anggota masyarakat tersebut serius dan memang membutuhkan program yang diberikan, yang tergambarkan dalam keaktifan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pada saat sosialisasi maupun pembentukan kelompok dan penentuan jenis kegiatan.

**b. Kegiatan Jasa Konsultan**

Tahap awal kegiatan Jasa Konsultan dilaksanakan Konsultan Perencanaan Pembangunan Wilayah mulai bulan Mei sampai dengan Juli 2009 yaitu dari tahap identifikasi dan inventarisasi wilayah, perencanaan pembangunan wilayah sampai pelaporan yang berlokasi di Desa Mallari, Desa Kajuara dan Desa Carigading.

Kegiatan konsultan Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah, Peningkatan Akses Kredit Mikro dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dilaksanakan mulai bulan Juli hingga September 2009 yang meliputi persiapan kegiatan, pelatihan, pendampingan dan pelaporan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di SUPM Negeri Bone sedangkan kegiatan pendampingan dilaksanakan di 3 (tiga) desa sasaran program yaitu Desa Mallari, Desa Kajuara dan Desa Carigading.

Peserta dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh konsultan PNPM Mandiri-KP berjumlah 40 orang yang terdiri dari aparatur daerah, unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Substansi dari kegiatan jasa konsultan PNPM Mandiri-KP adalah untuk memberikan bimbingan dan latihan yang berhubungan dengan kegiatan atau program. Hasil dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur daerah, unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sehingga pelaksanaan PNPM Mandiri-KP dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dan tepat tujuan.

## **2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM M-KP) di Kecamatan Awangpone Tahun 2010**

Dalam pelaksanaannya PNPM Mandiri Kelautan Perikanan memiliki 5 komponen program yaitu:

### **a. Pengembangan Masyarakat**

Kegiatan pengembangan masyarakat PNPM M-KP Tahun 2010 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat bidang kelautan dan perikanan agar mampu melakukan peningkatan kompetensi dan kapasitas usahanya sehingga dapat memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jenis kegiatan pengembangan masyarakat terdiri dari: persiapan, kegiatan ini merupakan kegiatan awal dalam rangka persiapan yang akan dilakukan, setelah itu melakukan pelatihan yang dilaksanakan dimasing-masing desa, kegiatan pelatihan ini mengundang narasumber dari pusat atau daerah, setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan pendampingan kepada masyarakat sasaran kegiatan.

### **b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)**

Komponen ini ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menunjang kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Pada komponen ini masyarakat mulai dibina untuk memulai sebuah usaha maupun mengembangkan usaha yang telah dirintis sebelumnya melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan berusaha

### **c. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program**

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program ditujukan agar kegiatan usaha yang telah dilakukan sebelumnya dikembangkan melalui jalinan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang dianggap berpotensi untuk

pengembangan usaha dimaksud. Jalinan kemitraan ini antara lain dapat menggunakan sistem inti plasma.

#### **d. Publikasi**

Kegiatan publikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan pada bulan Juni hingga Desember Tahun 2010 melalui Bulletin PNPM Mandiri-KP dan media elektronik yaitu Radio lokal yang ada di Kabupaten Bone.

Kegiatan publikasi yang dilakukan berupa penyebarluasan informasi program melalui media elektronik atau radio yang berisi tujuan dan sasaran dari PNPM Mandiri – KP serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut selama ini. Melalui siaran radio ini kegiatan PNPM Mandiri-KP disebarluaskan dengan durasi 3 kali dalam sehari selama 6 bulan berturut-turut. Selain itu bentuk publikasi juga berupa pembuatan bulletin PNPM Mandiri-KP.

#### **e. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi kegiatan PNPM Mandiri-KP yang berupa perjalanan lokal dilakukan oleh Tim Monev (Pengelola Program) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone kepada kelompok penerima PNPM Mandiri-KP di 3 (tiga) desa mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember.

Hasil dari kegiatan monev ini menjadi bahan laporan dalam kegiatan lokakarya nasional untuk selanjutnya menjadi acuan dalam kesinambungan program.

## B. Prosedur atau Mekanisme Penyaluran Dana PNPM M-KP

Calon penerima BLM diidentifikasi, diseleksi dan diverifikasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat (Tim PM) berupa pembuatan Berita Acara untuk kemudian diusulkan untuk menerima BLM kepada Kuasa Pengguna Anggaran PNPM Mandiri-KP .

**Tabel 10.** Identifikasi Kelompok

No	Desa	Jenis Usaha	Jumlah Kelompok	Jumlah orang
1	Kajuara	Penangkapan Ikan	3	24
		Pembudidaya Tambak	4	34
		Pembudidaya Rumput Laut	6	60
		Pemasaran	1	7
		<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>125</b>
2	Mallari	Penangkapan Ikan	4	34
		Pembudidaya Tambak	4	34
		Pembudidaya Rumput Laut	8	71
		Pemasaran	1	10
		<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>149</b>
3	Carigading	Penangkapan/Pengawasan	3	27
		Pembudidaya Tambak	3	25
		Pemasaran	1	9
		<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>61</b>
<b>Sub Total</b>			<b>38</b>	<b>335</b>

*Sumber. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, 2010.*

Identifikasi kelompok dilaksanakan pada bulan Oktober 2009. Dari hasil identifikasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat melakukan verifikasi dari 38 kelompok dengan jumlah anggota 335 orang yang telah terbentuk direkomendasikan sebanyak 25 kelompok dengan jumlah anggota 241 orang yang berhak menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), sedangkan 13 kelompok lainnya ( 94 orang) tidak menerima dana BLM karena masuk dalam kategori mampu berdasarkan ranking tingkat kesejahteraannya. Adapun kelompok yang akan menerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ini adalah sebagai berikut :



**Tabel 11.** Kelompok Penerima Dana BLM

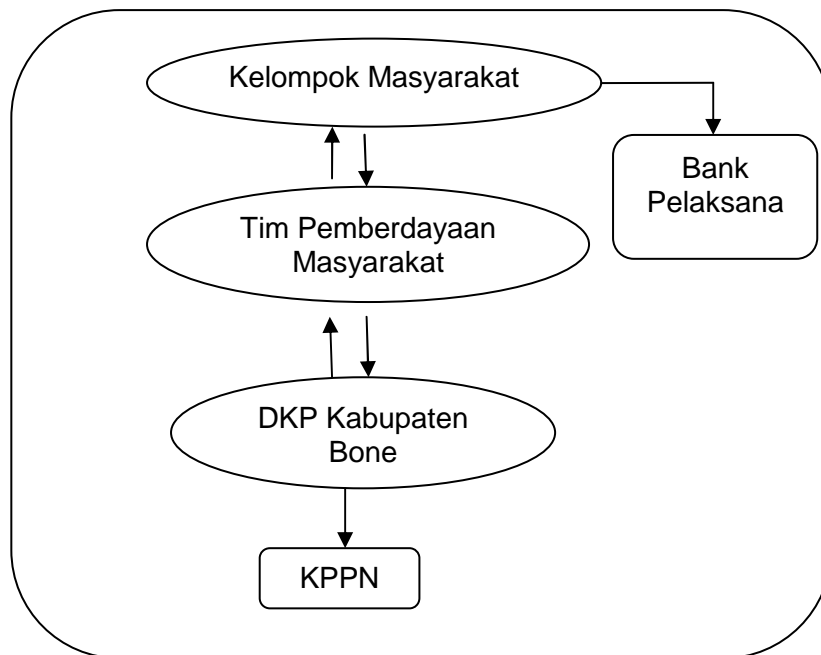
No	Desa	Jenis Usaha	Jumlah Kelompok	Jumlah Orang
1	Kajuara	Penangkapan Ikan	1	10
		Pembudidaya Tambak	2	20
		Pembudidaya Rumput Laut	5	50
		Pemasaran	1	7
		<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>87</b>
2	Mallari	Penangkapan Ikan	1	10
		Pembudidaya Tambak	2	20
		Pembudidaya Rumput Laut	7	65
		Pemasaran	1	10
		<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>105</b>
3	Carigading	Penangkapan/Pengawasan	2	20
		Pembudidaya Tambak	2	20
		Pemasaran	1	9
		<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>49</b>
<b>Sub Total</b>			<b>25</b>	<b>241</b>

*Sumber. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, 2010.*

Khusus untuk Desa Carigading kelompok penangkapan ikan dimasukkan dalam kelompok pengawasan karena rata-rata pelaku usaha penangkapan di desa ini hanya merupakan buruh/sawi bagang perahu, oleh karena itu berdasarkan kesepakatan maka di desa ini dana BLM difungsikan untuk membangun gedung pengawasan beserta sarana dan prasarananya.

Penyaluran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan dilakukan setelah verifikasi proposal kelompok dilaksanakan. Terlebih dahulu kelompok memasukkan proposal kebutuhan dana yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), selanjutnya Tenaga Pendamping (TP) memberikan rekomendasi kepada Bank pelaksana dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI), sehingga dana dapat tersalurkan kepada kelompok masyarakat untuk pengembangan usaha budidaya rumput laut, budidaya tambak, penangkapan ikan, dan pemasaran hasil perikanan. Tiap-tiap kelompok telah dibukakan rekening pada Bank BNI untuk memudahkan proses

penyaluran dan pengembalian dana bergulir tersebut. Mekanisme penyaluran dana dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 6.** Mekanisme Penyaluran Dana PNPM Mandiri KP

Keterangan:

1. Kelompok masyarakat menyampaikan usulan proposal kegiatan dan besaran BLM sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen perencanaan kepada Tim Pemberdayaan Masyarakat (Tim PM) yang telah ditetapkan oleh Dinas Kabupaten Bone.
2. Tim PM melakukan identifikasi, verifikasi dan seleksi terhadap usulan proposal calon penerima BLM sesuai dengan kriteria yang berlaku kepada Ketua Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone menetapkan penerima BLM yang telah diajukan oleh Tim PM.
4. Tim PM mensosialisasikan hasil penetapan penerima BLM kepada kelompok masyarakat.

5. Penerima BLM membuka rekening atas nama kelompok masyarakat ke bank BNI dilampiri 3 (tiga) spesimen tanda tangan yang terdiri atas ketua, sekertaris, dan bendahara.
6. Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone mengusulkan penerima dana BLM ke KPPN.
7. KPPN mencairkan dana BLM ke rekening penerima.

Proses penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) oleh pihak perbankan berhubungan langsung dengan penerima dana bantuan, namun demikian para kelompok budidaya rumput laut, budidaya ikan, penangkapan ikan, dan pemasaran hasil perikanan harus memenuhi persyaratan yang meliputi surat rekomendasi, foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) anggota kelompok masyarakat dan fotocopy SK Kepala Dinas Kabupaten Bone tentang pengesahan kelompok masyarakat, Fotocopy nomor rekening kelompok masyarakat, Jenis dan besaran BLM, daftar nama anggota kelompok, kuitansi tanda terima penerima BLM, SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) untuk menjamin bahwa dana yang diberikan dimanfaatkan sesuai dengan proposal atau peruntukannya. Selanjutnya informasi penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dapat dilihat pada Tabel 12.

**Tabel 12.** Bantuan Langsung Masyarakat pada PNPM Mandiri KP Kecamatan Awangpone

Desa	KLP	Jumlah (Orang)	Pemanfaatan BLM				Jumlah BLM (Rp.000)
			Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap	P2HP	P2SDKP	
			(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)	
Kajuara	9	87	152.000	20.410	5.250	0	177.660
Mallari	11	105	185.000	20.410	7.500	0	212.910
Carigading	5	49	42.000	0	6.750	57.000	105.750
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>241</b>	<b>379.000</b>	<b>40.820</b>	<b>19.500</b>	<b>57.000</b>	<b>496.320</b>

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, 2010.

Tabel 12 terlihat bahwa Tahun 2009 Kabupaten Bone memperoleh alokasi dana BLM sebesar Rp.496.320.000,- melalui PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, yang diperuntukkan kepada kelompok masyarakat yang berusaha dalam sektor kelautan dan perikanan khususnya di kecamatan Awangpone desa Kajuara, Mallari dan Carigading.

Pemanfaatan BLM terbesar untuk usaha perikanan budidaya sebanyak Rp.379.000.000,-. Hal ini dikarenakan perikanan budidaya di Kabupaten Bone Kecamatan Awangpone telah menjadi primadona bagi aktivitas mata pencaharian masyarakat pesisir. Fenomena ini tertampilkan melalui banyaknya nelayan tangkap yang beralih menjadi petani rumput laut bahkan menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Selanjutnya perikanan tangkap sebanyak Rp.40.820.000,-, P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) sebanyak Rp.19.500.000,- dan P2SDKP (Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) sebanyak Rp.57.000.000,-. Dana tersebut diharapkan mampu menjadi tambahan modal usaha bagi kelompok masyarakat yang kemudian mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka.

Pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari KPPN Watampone langsung ke rekening kelompok induk yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Lestari Kecamatan Awangpone yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Dana BLM mulai dicairkan oleh pengurus KUB Mina Lestari pada akhir bulan Desember untuk kemudian dimanfaatkan untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok untuk kemudian disalurkan kepada masing-masing anggota kelompok yang membutuhkan. Adapun efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat dengan menggunakan

penilaian skala likert, maka diperoleh hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 13.** Efektifitas Penyaluran Dana PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone

Kategori	Bobot	Frekuensi	Nilai (BxF)	Presentase (%)	Keterangan
Efektif	3	121	300	73	
Kurang Efektif	2	68	66	16	
Tidak Efektif	1	27	47	11	
<b>Jumlah</b>		<b>216</b>	413	<b>100</b>	
<b>Rata-Rata</b>			<b>2.44</b>		<b>Efektif</b>

Sumber. Data Primer Hasil Olahan, 2011.

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa, penyaluran dana bergulir berupa Bantuan Langsung Masyarakat pada PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone diperoleh rata - rata nilai sebesar 2,44, yang termasuk dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PNPM Mandiri KP dalam hal ini penyaluran dana BLM di Kecamatan Awangpone sudah maksimal dalam pelaksanaannya dilapangan. Berikut keterangan yang diperoleh dari Tenaga Pendamping akan hal tersebut:

*"...menurut saya sangat efektif, dana inikan diperuntukkan kepada kelompok masyarakat yang berusaha dalam sektor kelautan dan perikanan. kami juga libatkan semua pihak yang terkait dalam program ini, baik itu dalam perencanaan penyaluran maupun dalam proses penyalurannya..." (SA, wawancara 24 Juni 2011)*

Sementara itu warga yang juga penerima manfaat dana bergulir menyatakan:

*"...menurut saya tepat sekalimi ini dana yang sampai ke warga kampung kami, warga disini sangat butuh dana untuk melanjutkan usahanya..." (IL, wawancara 24 Juni 2011)*

Beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi PNPM

Mandiri KP dalam hal penyaluran dana bergulir sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Olehnya itu kelompok masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai dana hibah tersebut melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan.

### **C. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM M-KP)**

#### **1. Tepat Sasaran**

Sasaran PNPM Mandiri-KP Tahun 2009 adalah masyarakat bidang kelautan dan perikanan, yaitu orang yang bertempat tinggal di wilayah pesisir atau diluar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Kelompok sasaran penerima dana BLM yaitu pembudidaya rumput laut, pembudidaya tambak, Pemasaran Hasil Perikanan, dan Penangkapan ikan. Sedangkan Sasaran penerima PNPM Mandiri – KP Tahun 2010 yaitu kelompok masyarakat, untuk setiap kecamatan paling sedikit terdapat 1 (satu) kelompok yang salah satu anggotanya sarjana dan diprioritaskan untuk kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri – KP Tahun 2009. Kelompok sasaran penerima BLM PNPM Mandiri – KP Tahun 2010 adalah sebagian besar kelompok penerima BLM PNPM Mandiri-KP Tahun 2009 dan keseluruhannya merupakan kelompok pembudidaya (Tambak dan Rumput Laut di Laut) yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone atas usulan dari Tim Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi.

Program PNPM M-KP telah memberikan kesempatan berusaha yang lebih besar dengan upaya optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut. meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan kesempatan yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong mewujudkan manajemen pembangunan partisipasi dan transparan.

Mengacu pada sasaran program tersebut, maka penyaluran dana PNPM M-KP di Kecamatan Awangpone di prioritaskan pula pada masyarakat miskin yang hidup di daerah pesisir yang memiliki pekerjaan yang terkait dengan perikanan dan kelautan yang terbentuk dalam satu Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) yang memiliki

salah satu unit usaha. Salah satu indikator yang dapat dipakai untuk menilai apakah anggota KMP tersebut miskin adalah tingkat pendapatan masing-masing KMP.

KMP binaan LEPP-M3 adalah KMP terpilih yang didasarkan pada hasil keputusan Tim Verifikasi yang terdiri dari Konsultan Manajemen, Tenaga Pendamping bersama mitra-mitra lainnya serta pengurus LEPP-M3 yang kemudian hasil verifikasi disahkan oleh Kepala dinas dan Perikanan Kabupaten Bone dan Pedoman Umum PNPM M-KP. Dengan adanya verifikasi langsung kelapangan diharapkan TP bersama LEPP-M3 dapat melihat langsung kondisi KMP yang akan dibentuk. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana PNPM M-KP di Kabupaten Bone Kecamatan Awangpone sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari program ini. Adapun efektifitas sasaran dana Bantuan Langsung Masyarakat dengan menggunakan penilaian skala likert, maka diperoleh hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 14.** Efektifitas Sasaran Penyaluran Dana PNPM Mandiri-KP di Kecamatan Awangpone

Kategori	Bobot	Frekuensi	Nilai (BxF)	Presentase (%)	Keterangan
Efektif	3	149	447	89	
Kurang Efektif	2	25	50	10	
Tidak Efektif	1	6	6	1	
<b>Jumlah</b>		<b>180</b>	503	100	
<b>Rata-Rata</b>			<b>2.79</b>		<b>Efektif</b>

*Sumber. Data Primer Hasil Olahan, 2011.*

Tabel 14 menunjukkan bahwa penyaluran dana PNPM M-KP di Kabupaten Bone Kecamatan Awangpone berada pada rata-rata nilai 2,79 yang berarti efektif dengan presentase 89%. Sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diinginkan dicapai dari program ini adalah masyarakat bidang kelautan dan perikanan, yaitu orang yang bertempat tinggal di wilayah pesisir atau diluar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Berikut keterangan yang diperoleh dari warga akan hal tersebut:

*"...saya rasa sangat tepat diberikan dikelompok kami, anggota kelompok sangat senang, kami rasakan betul manfaatnya.." (HY, wawancara 24 Juni 2011).*

Hal tersebut menunjukkan bahwa sasaran penyaluran dana PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone ini sudah tepat, dimana masyarakat penerima dana tersebut sangat merasakan manfaatnya.

## 2. Tepat Waktu

Bahasan ini akan dijelaskan apakah pencairan dana PNPM M-KP telah tepat waktu. Berdasarkan mekanisme pencairan dana tersebut, dalam hal ini Pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari KPPN Watampone langsung ke rekening kelompok induk yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Lestari Kecamatan Awangpone yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Dana BLM mulai dicairkan oleh pengurus KUB Mina Lestari pada akhir bulan Desember untuk kemudian dimanfaatkan untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok untuk kemudian disalurkan kepada masing-masing anggota kelompok yang membutuhkan. Adapun efektifitas waktu penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat dengan menggunakan penilaian skala likert, maka diperoleh hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 15.** Efektifitas Waktu Penyaluran Dana PNPM Mandiri-KP di Kecamatan Awangpone

Kategori	Bobot	Frekuensi	Nilai (BxF)	Presentase (%)	Keterangan
Efektif	3	84	252	86	
Kurang Efektif	2	17	34	12	
Tidak Efektif	1	7	7	2	
<b>Jumlah</b>		<b>108</b>	293	100	
<b>Rata-Rata</b>			<b>2.71</b>		<b>Efektif</b>

Sumber. Data Primer Hasil Olahan, 2011.



Tabel tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana PNPM M-KP di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sesuai dengan waktu penyalurannya. Penyaluran dana ini sampai kepada masyarakat tepat pada saat masyarakat pesisir ini membutuhkan dana tersebut untuk pengembangan usaha kelautan perikanan, dalam hal ini usaha penangkapan ikan, pembudidaya rumput laut, pembudidaya tambak dan pemasaran hasil perikanan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dibantu oleh konsultan pelaksana dan tenaga pendamping yang bertugas sehari-hari mendampingi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Tenaga pendamping yang merupakan ujung tombak kegiatan ini bertugas untuk membuat perencanaan kegiatan pendampingan masyarakat, mempersiapkan masyarakat untuk memperoleh berbagai paket bantuan, membantu masyarakat dalam menyusun proposal kegiatan usaha, mendampingi masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, baik dalam proses produksi maupun pemasaran, mendampingi masyarakat dalam proses pencairan dana BLM, membuat laporan perkembangan pelaksanaan program setiap bulan, dan mendampingi konsultan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga juga berfungsi sebagai fasilitator dan motivator.

### **3. Tepat Jumlah**

Indikator yang dapat dipakai untuk menilai apakah program yang dijalankan tepat jumlah adalah proposal usaha dan realisasi dana yang diterima oleh KMP. Dalam merencanakan kegiatan usaha, KMP membuat proposal usulan awal kegiatan, volume serta besarnya dana yang dibutuhkan. Dana usulan awal yang diusulkan adalah sebesar Rp. 496.320.000,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 16.** Rekapitulasi Usulan Dana PNPM M-KP Tahun 2009

No.	Desa	Jenis Usaha dan Nama Kelompk	Jumlah Anggota dalam Kelompok (orang)	Jumlah Anggota yang menerima	Jumlah Dana BLM yang diusulkan (Rp)	Jumlah Dana BLM yang diberikan (Rp)
1.	Mallari	<b>Penangkapan Ikan</b>			<b>20.410.000</b>	<b>20.410.000</b>
		1. Kelompok Pajjalae	10	10	20.410.000	20.410.000
		<b>Pembudidaya Tambak</b>			<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>
		1. Kelompok Bola Menre'E	10	10	21.000.000	21.000.000
		2. Kelompok Mattiro Deceng	10	10	21.000.000	21.000.000
		<b>Pembudidaya Rumput Laut</b>			<b>143.000.000</b>	<b>143.000.000</b>
		1. Kelompok Mega Buana	10	10	22.000.000	22.000.000
		2. Kelompok Sipaka Ada	10	10	22.000.000	22.000.000
		3. Kelompok Sipurennu	10	10	22.000.000	22.000.000
		4. Kelompok Polewali	10	10	22.000.000	22.000.000
		5. Kelompok Sipakainge	10	10	22.000.000	22.000.000
		6. Kelompok Mekar Jaya	10	10	22.000.000	22.000.000
		7. Kelompok Mattiro Tasi	5	5	11.000.000	11.000.000
		<b>Pemasaran</b>			<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>
		1. Kelompok Mattugengkeng	10	10	7.500.000	7.500.000
		<b>Jumlah</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>212.910.000</b>	<b>212.910.000</b>
2.	Kajuara	<b>Penangkapan Ikan</b>			<b>20.410.000</b>	<b>20.410.000</b>
		1. Kelompok Mallusetasi	10	10	20.410.000	20.410.000
		<b>Pembudidaya Tambak</b>			<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>
		1. Kelompok Beropa	10	10	21.000.000	21.000.000
		2. Kelompok Laka	10	10	21.000.000	21.000.000
		<b>Pembudidaya Rumput Laut</b>			<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000</b>
		1. Kelompok Ulu Salo	10	10	22.000.000	22.000.000
		2. Kelompok Pacciring	10	10	22.000.000	22.000.000
		3. kelompok Maccolli Loloe	10	10	22.000.000	22.000.000
		4. Kelompok Mammase-mase	10	10	22.000.000	22.000.000
		5. Kelompok Cinta Madinah	10	10	22.000.000	22.000.000
		<b>Pemasaran</b>			<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>
		1. Kelompok mallomo-lomoe	7	7	5.250.000	5.250.000
		<b>Jumlah</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>177.660.000</b>	<b>177.660.000</b>
3.	Carigading	<b>Penangkapan Ikan</b>			<b>57.000.000</b>	<b>57.000.000</b>
		1. Kelompok Bagang Jaya	10	10	40.000.000	40.000.000
		2. kelompok Tuna Abadi	10	10	17.000.000	17.000.000
		<b>Pembudidaya Tambak</b>			<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>
		1. Kelompok Masagenae	10	10	21.000.000	21.000.000
		2. Kelompok Sipakarennu	10	10	21.000.000	21.000.000
		<b>Pemasaran</b>			<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>
		1. Kelompok Larokka	9	9	6.750.000	6.750.000
		<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>105.750.000</b>	<b>105.750.000</b>
<b>Total Jumlah</b>		<b>25 Kelompok</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>496.320.000</b>	<b>496.320.000</b>

Sumber. Dinas Kelutan dan Perikanan Kabupaten Bone, 2010.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa usulan awal kegiatan KMP adalah Rp. 496.320.000,- serta jumlah KMP yang terbentuk adalah 25 kelompok dengan jumlah anggota 241 orang. Dana yang diusulkan setiap KMP pun berbeda-beda. Jumlah dana BLM yang diusulkan sesuai dengan jumlah dana BLM yang diberikan, karena ada rencana penggunaan BLM yang dilampirkan oleh tiap-tiap kelompok. Adapun efektifitas jumlah penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat dengan menggunakan penilaian skala likert, maka diperoleh hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 17.** Efektifitas Jumlah Penyaluran Dana PNPM Mandiri-KP di Kecamatan Awangpone

Kategori	Bobot	Frekuensi	Nilai (BxF)	Persentase (%)	Keterangan
Efektif	3	64	192	71	
Kurang Efektif	2	33	66	25	
Tidak Efektif	1	11	11	4	
<b>Jumlah</b>		<b>108</b>	<b>269</b>	<b>100</b>	
<b>Rata-Rata</b>			<b>2.49</b>		<b>Efektif</b>

Sumber. Data Primer Hasil Olahan, 2011.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata berada pada 2.49 yang berarti efektif dengan jumlah persentase 71%. Berdasarkan indikator tersebut mengenai tepat jumlah maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PNPM-KP dapat dikategorikan tepat jumlah karena proposal yang diajukan oleh KMP sudah dapat dipenuhi.

**Tabel 18.** Rekapitulasi Usulan Dana PNPM M-KP Tahun 2010

No	Desa	Jenis Usaha	Nama Kelompok	Jumlah anggota dalam Kelompok	Jumlah Anggota yang Menerima	Jumlah dana yang diusulkan (Rp)	Jumlah Dana yang diterima (Rp)
1	Kajuara	Budidaya Tambak	1. Beropa	10 orang	10 orang	24.933.000	24.933.000
			2. Laka	10 orang	10 orang	24.364.000	24.364.000
			3. Tunas Abadi	9 orang	9 orang	25.018.000	25.018.000
		Budidaya Rumput Laut	1. Ulu Salo	10 orang	10 orang	20.420.000	20.420.000
			2. Pacciring	10 orang	10 orang	20.372.500	20.372.500
			3. Maccolli loloe	10 orang	10 orang	20.280.000	20.280.000
			4. Mammase-mase	10 orang	10 orang	19.150.000	19.150.000
			5. Cinta Madinah	10 orang	10 orang	20.000.000	20.000.000
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>8 Kelompok</b>	<b>79 orang</b>	<b>79 orang</b>	<b>174.537.500</b>	<b>174.537.500</b>

**Lanjutan Tabel 18.** Rekapitulasi Usulan Dana PNPM M-KP Tahun 2010

No	Desa	Jenis Usaha	Nama Kelompok	Jumlah anggota dalam Kelompok	Jumlah Anggota yang Menerima	Jumlah dana yang diusulkan (Rp)	Jumlah Dana yang di terima (Rp)
2	Mallari	Budidaya Tambak	1. Bola Menre'e	10 orang	9 orang	23.834.000	23.834.000
			2. Mattiro Deceng	10 orang	10 orang	31.942.000	31.942.000
			3. Maccahaya	10 orang	9 orang	38.389.000	38.389.000
		Budidaya Rumput Laut	1. Mega Buana	10 orang	9 orang	17.939.000	17.939.000
			2. Sipaka Ada	10 orang	9 orang	18.676.500	18.676.500
			3. Sipurennu	10 orang	9 orang	18.336.000	18.336.000
			4. Polewali	10 orang	9 orang	20.271.000	20.271.000
			5. Sipakainge	10 orang	10 orang	20.245.000	20.245.000
			6. Mekar Jaya	10 orang	10 orang	20.150.000	20.150.000
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>9 Kelompok</b>	<b>90 orang</b>	<b>84 orang</b>	<b>209.782.500</b>	<b>209.782.500</b>
3	Carigading	Budidaya Tambak	1. Masagenae	10 orang	8 orang	23.275.000	23.275.000
			2. Sipakarennu	10 orang	10 orang	32.260.000	32.260.000
			3. Turungeng Tonrae	7 orang	6 orang	22.535.000	22.535.000
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>3 Kelompok</b>	<b>27 orang</b>	<b>24 orang</b>	<b>78.070.000</b>	<b>78.070.000</b>
	<b>Total Jumlah</b>		<b>20 kelompok</b>	<b>196 orang</b>	<b>187 orang</b>	<b>462.390.000</b>	<b>462.390.000</b>

Sumber. Dinas Kelutan dan Perikanan Kabupaten Bone, 2010.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa usulan awal kegiatan KMP adalah Rp. 462.390.000,- serta jumlah KMP yang terbentuk adalah 20 kelompok dengan jumlah anggota 196 orang. Tetapi yang sebenarnya mendapat Dana BLM hanya 187 orang, sedangkan yang 9 orang tersebut tidak mendapat dana karena mereka malas ikut dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan rapat kelompok. Dana yang diusulkan setiap KMP pun berbeda-beda. Jumlah dana BLM yang diusulkan sesuai dengan jumlah dana BLM yang diberikan, karena ada rencana penggunaan BLM yang dilampirkan oleh tiap-tiap kelompok.

#### **E. Mekanisme Pengembalian Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM M-KP)**

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pengembalian dana bantuan oleh kelompok usaha, sebagaimana yang telah diuraikan bahwa kelompok usaha mengembalikan dana tidak teratur (biasanya dibayar lima bulan sekaligus) tetapi ada juga yang sama sekali tidak

mengembalikannya, tergantung dari kesepakatan kelompok masing-masing. Pemanfaatan BLM dengan dana bergulir adalah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat untuk dijadikan modal usaha sehingga ada perputaran dana. Namun pada kenyataannya pengembalian dana bergulir tersebut mengalami kendala karena sebagian dari kelompok penerima manfaat lalai dalam pengembalian dana pinjaman tersebut dan kemampuan kelompok untuk mengembalikan sangat minim. Adapun efektifitas pengembalian dana Bantuan Langsung Masyarakat dengan menggunakan penilaian skala likert, maka diperoleh hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 19.** Efektifitas Pengembalian Dana PNPM Mandiri-KP di Kecamatan Awangpone

Kategori	Bobot	Frekuensi	Nilai (BxF)	Persentase (%)	Keterangan
Efektif	3	48	144	41	
Kurang Efektif	2	71	142	41	
Tidak Efektif	1	61	61	18	
<b>Jumlah</b>		<b>180</b>	<b>347</b>	<b>100</b>	
<b>Rata-Rata</b>			<b>1.93</b>		<b>Kurang Efektif</b>

Sumber. Data Primer Hasil Olahan, 2011.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa proses pengembalian dana PNPM M-KP di Kabupaten Bone Kecamatan Awangpone berada pada nilai rata-rata 1.93 dengan jumlah persentase 41% atau kurang efektif dengan yang diharapkan program ini. Hal ini disebabkan berbagai macam alasan dari petani, diantaranya panen yang gagal, adanya anggota kelompok lain yang tidak mengembalikan dana, dan tidak ada lagi yang menagih. Berikut keterangan yang diperoleh dari Tenaga Pendamping akan hal tersebut:

*"sebenarnya program ini sangat bagus, tetapi karena persepsi masyarakat mengatakan bahwa dana itu hibah jadi tidak perlu dikembalikan, padahal sebenarnya dana ini pengembaliannya sangat ringan. Nah, disini sebenarnya kenapa kemudian dikatakan bahwa PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone ini cacat..." (AD, wawancara 19 Juni 2011)*

Pernyataan senada diungkapkan oleh AM, (30 Tahun) staff Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone:

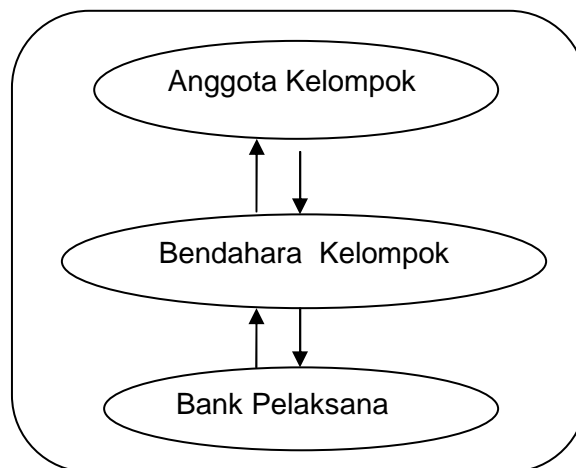
*"...Sebenarnya masyarakat yang salah persepsi tentang dana hibah ini, yang dimaksud hibah disini adalah karena dana itu diberikan bukan berupa pinjaman, tetapi harus dikembalikan dan bergulir untuk menunjang penanggulangan kemiskinan pada masyarakat pesisir..." (wawancara 19 Juni 2011)*

Sementara itu warga yang juga penerima manfaat dana bergulir menyatakan:

*"Bagaimana caranya kita mau kembalikan kalau pendapatan tidak menentu, mana lagi kalau hasil tangkapan yang cuma sedikit, hanya untuk dimakan ji juga. Belum lagi kalau angin kencang, kami tidak melaut. Saya rasa tidak perluji dikembalikan, ndak apaji juga" (SH, wawancara 22 Juni 2011).*

Beberapa pernyataan di atas menunjukkan bahwa implementasi PNPM Mandiri KP dalam hal pengembalian pinjaman dana bergulir belum mencapai tujuan yang diharapkan. Olehnya itu kelompok masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai dana hibah tersebut melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan.

Mekanisme pengembalian dana oleh kelompok berdasarkan hasil kesepakatan dari kelompok tersebut. Masyarakat penerima manfaat mengembalikan dana ke bendahara kelompok. Bendahara kelompok yang kemudian mengembalikan dana bergulir ini ke Bank yang bersangkutan. Begitupun sebaliknya dengan proses penyaluran yang dalam hal ini Bank menyalurkan dana ke bendahara kelompok, kemudian bendahara menyalurkan dana ke anggota kelompoknya sesuai dengan permintaan anggota kelompoknya masing-masing. Secara skematik dapat di lihat pada gambar tersebut.



**Gambar 7.** Mekanisme Pengembalian Dana Bergulir

#### **E. Manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM M-KP)**

Manfaat PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone Desa Mallari, Kajuara, dan Carigading yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui aspek kelompok, pemanfaatan modal, dan peningkatan pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kelompok penerima manfaat PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone, maka manfaat yang diperoleh yaitu:

##### **1. Aspek Peningkatan Kelompok Masyarakat**

Salah satu upaya dalam membangun pemberdayaan masyarakat adalah dengan membangun kelompok di tengah masyarakat. Kelompok dimaksud untuk memberikan wadah bagi masyarakat dan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pendekatan individual. Paling tidak akan terjadi aktifitas bersama dalam wadah kelompok yang akan menghadirkan sumberdaya tertentu. Hal ini diungkapkan oleh pendamping PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone:

*“sebenarnya tujuan dari PNPM Mandiri KP adalah untuk meningkatkan SDM masyarakat Indonesia dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa kemudian pembinaan dilakukan di tingkat kelompok yang bergerak dalam usaha yang sama, karena kami ingin mereka bersatu dan kompak dalam usaha-usaha mereka yang tentunya tidak keluar dari capaian program ini” (UV, wawancara 20 Juni 2011)*

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pembangunan kelompok di tengah masyarakat merupakan langkah awal menentukan pencapaian tujuan. Hadirnya PNPM Mandiri KP di tengah-tengah masyarakat melahirkan kelompok-kelompok aktif yang senantiasa berperan penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan penyaluran dana BLM, masyarakat diharuskan membentuk kelompok yang tergabung dalam usaha sejenis baik itu budidaya rumput laut, budidaya tambak, penangkapan ikan, dan pemasaran hasil perikanan dimana setiap kelompok harus terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara, dan anggota. Dinas Kelautan dan Perikanan bidang PNPM Mandiri KP, setiap waktu tertentu memberikan sosialisasi kepada kelompok masyarakat sehubungan dengan program yang membuat masyarakat selalu terlibat dalam kegiatan kelompoknya.

Kelompok penerima manfaat program di Desa Mallari, Kajuara dan Carigading terbentuk dengan melakukan pertemuan / Focus Group Discussion (FGD) ditingkat dusun berupa penentuan rangking tingkat kesejahteraan masyarakat di 9 (sembilan) dusun di 3 (tiga) desa, setelah itu melakukan musyawarah desa (musdes) untuk mengidentifikasi pelaku usaha kelautan dan perikanan di setiap dusun, kemudian melakukan penyebar luasan informasi berupa pengumuman hasil perengkingan untuk kemudian dibentuk menjadi sejumlah kelompok berdasarkan jenis usaha / kegiatannya, setelah itu melakukan musyawarah kecamatan untuk menentukan berapa jumlah kelompok yang berhak menerima BLM dan besaran dana yang diterima oleh masing-



masing kelompok, kemudian terbentuklah 25 kelompok yang terdiri dari 241 orang. Proses lahirnya kelompok itu sendiri memberikan kesan yang mendalam bagi masyarakat, terbukti dari beberapa pengakuan anggota kelompok yang menjadi responden sebagai berikut:

*"...setelah adanya kelompok, kami sudah punya wadah untuk diskusi dan berkarya, tidak adami juga warga yang saling mencurigai. Banyakmi juga pengalaman yang didapat..."(SY, wawancara tanggal 22 Juni 2011).*

*"...dulu tidak ada itu yang dibilang kelompok, sekarangpi ini. Kelompok sebagai tempat berkumpulnya warga. Jadi gampangmi kalau ada kegiatan..." (DgL, wawancara 22 Juni 2011)*

Pernyataan responden tersebut, memperlihatkan bahwa kehadiran kelompok dalam masyarakat telah memberikan dampak yang positif. Di Kecamatan Awangpone sendiri, sebelum adanya PNPM Mandiri KP belum ada pembentukan kelompok berdasarkan usaha yang dijalankan, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan dana. Beberapa dari responden merasakan adanya transfer ilmu yang didapatkan dari keterlibatannya dalam kelompok. Mereka juga mengakui adanya komunikasi baru yang tercipta dari lingkungan mereka.

## **2. Aspek Pemanfaatan Modal**

Salah satu manfaat yang diharapkan dari masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri KP adalah agar masyarakat mampu mengelola modal yang ada untuk memajukan diri secara bersama-sama. Kegiatan PNPM Mandiri KP dimaksudkan untuk memberikan modal bagi masyarakat melalui pemberian BLM berupa dana bergulir, dimana masyarakat diberikan dana hibah untuk dijadikan modal usaha ataupun untuk pengembangan usaha yang sudah ada. Di Kecamatan Awangpone, kelompok penerima manfaat telah mampu mempertanggungjawabkan pemakaian modal, apalagi tenaga pendamping dan penerima manfaat dituntut untuk mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparatif.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari PNPM Mandiri KP yang diberikan pemerintah dipergunakan untuk menambah modal usaha bagi masyarakat pesisir. Modal usaha merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pengembangan usaha kelompok. Adapun alokasi BLM pada kelompok usaha kelautan dan Perikanan di Kecamatan Awangpone dapat dilihat pada Tabel 20.

**Tabel 20.** Alokasi BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) di Kecamatan Awangpone

No.	Alokasi BLM	Frekuensi Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tali bentangan	7	19
2	Bibit	5	14
3	Perahu	1	3
4	Tali bentangan dan bibit	4	11
5	Jaring	3	8
6	Pukat	2	6
7	Pancing	1	3
8	Pupuk	9	25
9	cool box	4	11
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2011.*

Tabel 20 terlihat bahwa responden yang tergabung dalam kelompok usaha perikanan dan kelautan di Kecamatan Awangpone menggunakan bantuan modal dari PNPM Mandiri KP untuk membeli keperluan dalam proses produksi. Hal ini tergantung dari kebutuhan mereka, namun yang paling banyak adalah responden yang menggunakan modalnya untuk membeli tali bentangan dan bibit. Dalam penyaluran dana BLM, kelompok masyarakat senantiasa akan berhubungan langsung dengan pihak perbankan, yang mana merupakan sesuatu hal yang sangat jarang bahkan tidak mungkin ditempuh oleh kelompok masyarakat penerima manfaat dalam menutupi kekurangan modal usaha mereka.

Berikut penuturan responden (BD, 44 thn) seorang petani rumput laut sebagai perwakilan dari penuturan responden yang lain:

*"sebelum ada hibah dari PNPM Mandiri KP, meskipun kita sangat membutuhkan modal usaha, tapi kita tidak berani pinjam di Bank, banyak sekali syarat-syaratnya itu juga kita belum tentu dapat pinjaman. Mendingan ke pengumpul, karena langsung dapat. Sekarang setelah kita tau, baru berani pinjam kredit di Bank"*  
(wawancara tanggal 22 Juni 2011)

Paradigma yang terbentuk sejak dulu yang mengasumsikan Bank merupakan lembaga keuangan yang sulit ditempuh oleh petani dikarenakan banyaknya persyaratan dan proses yang berbelit-belit, selain itu pihak perbankan sendiri yang tidak berani memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dengan adanya PNPM Mandiri KP yang mengharuskan kelompok masyarakat berhubungan langsung dengan pihak perbankan dalam hal penyaluran BLM dan pembayaran pinjaman dana bergulir, dapat menjadi penghubung antara kelompok penerima manfaat dengan pihak perbankan sehingga masyarakat dapat merasakan sendiri kelebihan memperoleh kredit di bank dibandingkan dengan rentenir atau pedagang pengumpul. Dengan demikian secara perlahan mampu mengubah paradigma mereka tentang perbankan.

### **3. Aspek Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari PNPM Mandiri KP diberikan kepada kelompok masyarakat yang berusaha dalam sektor kelautan dan perikanan sebagai modal usaha dan atau pengembangan usaha. Bantuan modal usaha tersebut dipergunakan oleh kelompok masyarakat untuk membeli keperluan produksi dalam berusaha, ada yang digunakan untuk bibit, bentangan, perahu, pupuk, alat tangkap, cool box hal ini tergantung dari kebutuhan mereka.

Seluruh responden menyatakan bahwa pendapatan mereka meningkat dengan adanya BLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan yaitu sebanyak 36 responden. Hal ini disebabkan karena

mereka mempunyai modal untuk menambah produksi usaha mereka sehingga mengalami peningkatan pendapatan. Secara kontekstual peningkatan pendapatan ini akan menjadi penting dalam masyarakat pesisir karena konstruksi jaringan sosial senantiasa menempatkan nelayan atau pembudidaya dalam posisi yang tereksplorasi sehingga dengan adanya pendapatan yang tinggi tentunya sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan mereka kepada tengkulak dan semacamnya. Dengan adanya peningkatan pendapatan yang dialami oleh kelompok masyarakat sasaran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri kelautan Perikanan di Kecamatan Awangpone, tidak serta merta dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.

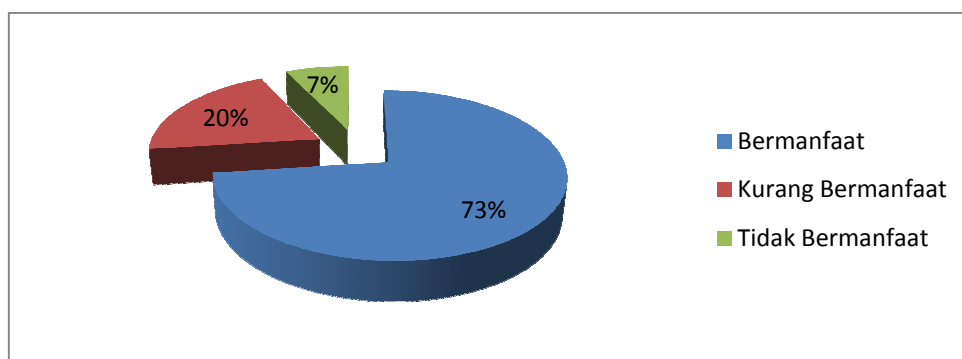
Menurut SN, staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone bahwa berhasil tidaknya program ini PNPM Mandiri KP adalah dengan adanya pergeseran yang terjadi pada kelompok penerima manfaat. Pergeseran yang dimaksud yaitu adanya peningkatan kelompok dalam masyarakat, adanya perkembangan usaha kelompok dalam masyarakat sehingga pendapatan pun meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Melihat ke empat indikator di atas untuk menjawab rumusan masalah nomor 4 (empat) bagaimana manfaat adanya PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan dengan mewawancarai 36 responden dengan menggunakan penilaian skala likert, maka diperoleh hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 21.** Manfaat Adanya PNPM M-KP

Kategori	Bobot	Frekuensi	Nilai (BxF)	Presentase	Keterangan
Bermanfaat	3	445	1335	73%	
Kurang Bermanfaat	2	179	358	20%	
Tidak Bermanfaat	1	132	132	7%	
<b>Jumlah</b>		756	1825	100%	
<b>Rata-Rata</b>			2.4		<b>Bermanfaat</b>

Sumber. Data Primer Hasil Olahan, 2011.

**Gambar 8.** Manfaat Adanya PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan

Melihat nilai rata-rata di atas yang di capai adalah 2.4 dengan persentase 73% yang berarti efektif. Di mana program-program yang di berikan dari PNPM M-KP sudah dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

#### **F. Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM M-KP)**

##### **1. Prosedur atau Mekanisme Penyaluran Dana PNPM M-KP**

Prosedur atau mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri KP berjalan sesuai dengan Pedoman Umum program tersebut. Hal ini menunjukkan efektifitas penyaluran dana berjalan sesuai perencanaan, dimana setiap kelompok melalui tiga tahap (Identifikasi, Seleksi, Verifikasi) dalam penentuan penyaluran dana.

**Tabel 22.** Matriks Evaluasi Implementasi Prosedur Penyaluran Dana PNPM Mandiri-KP

<b>Variabel</b>	<b>Konsep</b>	<b>Fakta Lapangan</b>
Identifikasi, Seleksi, Verifikasi	Kesesuaian Perencanaan dengan hasil dan tujuan program yang merefleksikan sasaran peningkatan sumberdaya manusia di kawasan pesisir.	Temuan dilapangan menunjukkan efektifitas penyaluran dana BLM tersebut, dimana hasil identifikasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat melakukan verifikasi dari 38 Kelompok dengan jumlah anggota 335 Orang yang telah terbentuk direkomendasikan sebanyak 25 kelompok dengan jumlah anggota 241 orang yang berhak menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), sedangkan 13 kelompok lainnya ( 94 Orang) tidak menerima dana BLM karena masuk dalam kategori mampu berdasarkan ranking tingkat kesejahteraannya

*Sumber. Data Primer Hasil Olahan, 2011.*

## **2. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM M-KP)**

Tahap pelaksanaan Program PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone menunjukkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran program. Hal ini terlihat pada kelompok sasaran prioritas adalah masyarakat pesisir yang membutuhkan dana tersebut untuk pengembangan usaha dibidang kelautan dan perikanan. Disamping keberhasilan tersebut, kekhawatiran juga kembali muncul, bahwa sasaran program pemberdayaan adalah desa miskin yang didiami oleh nelayan/petani ikan dan kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya yang notabene telah banyak menerima bantuan dari pemerintah. Efektifitas program dapat diukur dengan beberapa variabel; yaitu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Dengan melihat tabel di bawah ini.

**Tabel 23.** Matriks Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Penyaluran Dana dilihat dari Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah

Variabel	Konsep	Fakta Lapangan
Tepat Sasaran	Kelompok sasaran adalah masyarakat yang bergerak bidang kelautan dan perikanan, yaitu orang yang bertempat tinggal di wilayah pesisir atau diluar pesisir yang memiliki kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Seperti pembudidaya rumput laut, pembudidaya tambak, pemasaran hasil perikanan, dan penangkapan ikan.	Dalam penggunaan anggaran, fakta di lapangan menunjukkan bahwa efektifitas penyaluran dana PNPM M-KP di Kecamatan Awangpone di prioritaskan pada masyarakat miskin yang hidup di daerah pesisir dan memiliki pekerjaan yang terkait dengan perikanan dan kelautan yang terbentuk dalam satu Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) yang memiliki salah satu unit usaha.
Tepat Waktu	Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Dana PNPM Mandiri KP.	Hal ini berjalan sesuai dengan mekanisme penyaluran yang ditetapkan sesuai dengan waktu penyalurannya. Penyaluran dana ini sampai kepada masyarakat tepat pada saat masyarakat pesisir ini membutuhkan dana tersebut untuk pengembangan usaha kelautan perikanan, dalam hal ini usaha penangkapan ikan, pembudidya rumput laut, pembudidaya tambak dan pemasaran hasil perikanan.
Tepat Jumlah	Perencanaan dan Penggunaan Anggaran	Efektivitas biaya diukur dari biaya yang dikeluarkan dan manfaat serta dampak program yang dihasilkan. Anggaran cukup rasional dari sisi biaya per unit dan keseluruhan dan efektivitas biaya di tingkat lapangan.

Sumber. Data Primer Hasil Olahan, 2011.

### 3. Mekanisme Pengembalian Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM M-KP)

Masyarakat penerima manfaat tidak tepat waktu dalam pengembalian dana bergulir tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan dan pendampingan oleh pihak-pihak terkait sehingga program yang dilaksanakan tersebut kurang diserap dengan baik oleh masyarakat. Hal ini juga menunjukkan

bahwa kurangnya kepedulian dan dukungan masyarakat terhadap program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

**Tabel 24.** Matriks Evaluasi Implementasi Mekanisme Pengembalian Dana PNPM Mandiri Kelautan Perikanan

Variabel	Konsep	Fakta Lapangan
Manajemen Program	Mekanisme Pengembalian dana Program	Sebagian besar telah menerapkan mekanisme pengembalian sesuai dengan yang ditetapkan, tetapi di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pengembalian dana bantuan oleh kelompok usaha tidak teratur (biasanya dibayar lima bulan sekaligus) tetapi ada juga yang sama sekali tidak mengembalikannya, tergantung dari kesepakatan kelompok masing-masing.

*Sumber. Data Primer Hasil Olahan, 2011*

Secara umum, program PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sudah terbilang berhasil dari segi pelaksanaan. Pelaksanaan PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone melalui berbagai tahapan, yaitu: (a) sosialisasi program dan publikasi. Tahap ini dilakukan dengan sosialisasi program kepada masyarakat dan juga dengan musyawarah desa. Sosialisasi program oleh fasilitator dan petugas pelaksana program. Penyajian materi-materi dan metode pelatihan mampu diserap dengan baik oleh masyarakat pesisir. Dengan demikian, pihak pelaksana mampu menggali informasi – informasi yang penting tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta jenis kegiatan apa yang masyarakat inginkan dapat tergali dalam pendekatan metode yang dimaksud. Hal ini menunjukkan efektifitas pelaksanaan program tersebut. Pendampingan masyarakat pun mampu berjalan sesuai dengan tujuan dari program ini, dimana masyarakat mampu membentuk organisasi atau kelompok berdasarkan kebutuhan real masyarakat.



Proses dan mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri KP berjalan sesuai dengan Pedoman Umum program tersebut. Hal ini menunjukkan efektifitas penyaluran dana berjalan sesuai perencanaan, dimana setiap kelompok melalui tiga tahap (Identifikasi, Seleksi, Verifikasi) dalam penentuan penyaluran dana. Temuan dilapangan menunjukkan efektifitas penyaluran dana BLM tersebut, dimana hasil identifikasi oleh Tim Pemberdayaan Masyarakat melakukan verifikasi dari 38 Kelompok dengan jumlah anggota 335 Orang yang telah terbentuk direkomendasikan sebanyak 25 kelompok dengan jumlah anggota 241 orang yang berhak menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), sedangkan 13 kelompok lainnya ( 94 Orang) tidak menerima dana BLM karena masuk dalam kategori mampu berdasarkan rangking tingkat kesejahteraannya.

Kesesuaian hasil dengan tujuan program yang merefleksikan kelompok sasaran yang mencerminkan keadaan sebenarnya di masyarakat pesisir, seperti pembudidaya rumput laut, pembudidaya tambak, pemasaran hasil perikanan, dan penangkapan ikan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa efektifitas penyaluran dana PNPM M-KP di Kecamatan Awangpone di prioritaskan pada masyarakat miskin yang hidup di daerah pesisir dan memiliki pekerjaan yang terkait dengan perikanan dan kelautan yang terbentuk dalam satu Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) yang memiliki salah satu unit usaha. Proses penyaluran pun berjalan sesuai dengan mekanisme penyaluran yang ditetapkan sesuai dengan waktu penyalurannya. Efektivitas biaya diukur dari biaya yang dikeluarkan dan manfaat serta dampak program yang dihasilkan.

Manajemen program ini tidak berjalan optimal, sebagian besar telah menerapkan mekanisme pengembalian sesuai dengan yang ditetapkan, tetapi di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pengembalian dana bantuan oleh kelompok usaha tidak teratur (berdasarkan kesepakatan kelompok) tetapi ada

juga yang sama sekali tidak mengembalikannya, tergantung dari kesepakatan kelompok masing-masing. Hal ini disebabkan kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

### **G. Rekomendasi**

PNPM M-KP sesungguhnya masih kurang optimal yang ditunjukkan dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembalikan dana bergulir tersebut serta kurang mampunya membangun proses keberdayaan masyarakat untuk mengenali masalah dan menentukan langkah penyelesaian. Beberapa pelajaran yang dapat direkomendasikan untuk program tersebut kedepan adalah:

1. Dalam penyusunan program pelaksanaan maka harus dikerjakan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, dikarenakan tanpa adanya penyesuaian lapangan maka pelaksanaan tersebut dapat tidak optimal dan terancam gagal karena program tersebut tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada.
2. Dalam pelaksanaan program, pemerintah harus terus melakukan pendampingan kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar siap dan memahami tentang isi dari program tersebut. Tanpa adanya pendampingan dari pemerintah maka jalannya program tersebut akan kurang optimal.
3. Pemerintah harus lebih melakukan pengawasan (struktural, fungsional dan partisipatif) pada penggunaan dana, karena tanpa adanya pengawasan maka penggunaan anggaran tidak dapat dikendalikan, sehingga penggunaan anggaran tidak efisien.
4. Program yang ada harus lebih diutamakan pada peningkatan kreativitas dan pengetahuan akan sumberdaya pesisir sehingga masyarakat pesisir mampu berkembang dengan sendirinya, serta dalam pemanfaatan sumberdaya nantinya tetap bisa menjaga kondisi lingkungan pesisir tersebut.

## **VI. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur atau mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri KP berjalan sesuai dengan Pedoman Umum program tersebut. Hal ini menunjukkan efektifitas penyaluran dana berjalan sesuai perencanaan, dimana setiap kelompok melalui tiga tahap (Identifikasi, Seleksi, dan Verifikasi) dalam penentuan penyaluran dana.
2. Tahap pelaksanaan Program PNPM Mandiri KP di Kecamatan Awangpone menunjukkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran program. Hal ini terlihat pada kelompok sasaran prioritas adalah masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok pembudidaya rumput laut, pembudidaya tambak, penangkapan ikan, dan pemasaran hasil perikanan yang membutuhkan dana tersebut untuk pengembangan usaha dibidang kelautan dan perikanan.
3. Pengembalian dana bantuan PNPM M-KP tidak sesuai dengan yang diharapkn. Hal ini disebabkan kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
4. Manfaat adanya PNPM M-KP di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone yaitu meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat penerima program, berkembangnya skala usaha kelompok masyarakat, adanya peningkatan produksi, dan pemanfaatan modal yang berjalan cukup baik, dengan adanya PNPM Mandiri KP dapat mengubah pandangan masyarakat tentang perbankan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah

1. Diperlukan pembinaan kelompok dan pendekatan personal terhadap masyarakat penerima manfaat agar program ini berjalan sesuai dengan konsep dan tujuannya.. karena berdampak pada lambannya perguliran dana sehingga pencapaian dari tujuan program ini tidak optimal
2. Mengoptimalkan pengawasan oleh pihak-pihak yang terkait (Struktural, Fungsional, Partisipatif) terhadap masyarakat penerima manfaat agar dalam program PNPM Mandiri KP ini mampu mencapai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat pesisir serta program PNPM M-KP dapat terus berlanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. PT Pradya Paramitha. Jakarta.
- Dahuri. 2002. *Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Nasional*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dahuri dan Alimuddin. 2004. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradya Paramitha. Jakarta
- Hasan, D. 2002. *Strategi Pengembangan Rumput Laut Berorientasi Agribisnis di Propinsi Riau*. Tesis. IPB Bogor.
- Imran,M. 2003. *Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. Jakarta
- Kusumastanto, T. 2003 *"Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah"*. PT. Gramedia Pustaka Utama.160 hl.
- Mubyarto. 2000. *Nelayan dan Kemiskinan*. Rajawali Press. Jakarta
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ohama, Yutaka. 2001. *Participatory Approach. Bahan Pelatihan dalam JICA International Training on PLSD: Theories and Practices*. Nagoya.
- Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan. 2009.
- Petunjuk Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. 2009.
- Purwadaminta. 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Putaka. Jakarta.
- Riyadi, dkk. 2003. *Kebijakan, Perencanaan Pembangunan nasional Bidang Sumberdaya Laut dan Pesisir Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Otonomi Daerah*. Menteri Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Jakarta. Tanggal 26 Februari. 2003.
- Singarimbun dan Effendi, S. 2004. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Soehartono, 2008. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya. Jakarta.
- Soekartawi, 2003. *Teori Ekonomi Produksi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Solihin, A. 2005. *Pendekatan Sosial-Budaya Memberdayakan Nelayan*, Majalah Cakrawala TNI-AL.

Supranto, 1992. *Metode Riset dan Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta.

Syahrani, 2007. *Evaluasi Kinerja LEPP-M3 Kota Makassar (Studi Kasus Koperasi X Kecamatan Ujung Tanah)*. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Wahyono, Ary. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Media Pressindo, Yogyakarta.

Widodo, dkk. 2006. *Sistem Perikanan*. Rajawali Press. Jakarta.

Rujukan dari internet :

([www.kp3k.dkp.go.id](http://www.kp3k.dkp.go.id), 2009). *PNPM Mandiri Menyentuh Nelayan*. Akses Maret 2011. Makassar.

(<http://id.wikipedia.org/wiki/evaluasi>). *Defenisi Evaluasi*. Akses Maret 2011. Makassar.

(<http://webcache.googleusercontent.com>). Akses Maret 2011. Makassar.

(<http://dkp.sulteng.go.id>). *PNPM Mandiri-KP. Harapan Nelayan dan petani Ikan Miskin*. Akses Maret 2011. Makassar.

